



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 49 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
15. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

BAB II
STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 2

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (4) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (5) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 3

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Kedua
Kode Rekening APBD
Pasal 4

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 5

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Pasal 6

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kode akun Keuangan Daerah Kabupaten Siak tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (4) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Kode rekening pendapatan, kode rekening belanja, dan kode rekening pembiayaan merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.
- (6) Untuk keselarasan dan penyesuaian urusan dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta untuk penyempurnaan lebih lanjut menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah, penambahan kode rekening APBD agar dikonsultasikan lebih lanjut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Siak.

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam menyusun RKA-SKPD masing-masing agar mempedomani dan menyesuaikan dengan kode rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 36) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Desember 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 49

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
 KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI
1	2	3	4
1	URUSAN WAJIB		
1.01	Pendidikan	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02	Urusan Pendidikan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
		1.01.03	Urusan Pendidikan (Sekretariat Daerah)
1.02	Kesehatan	1.02.01	Dinas Kesehatan
		1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah
1.03	Pekerjaan Umum	1.03.01	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		1.03.02	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
1.04	Perumahan	1.04.01	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.04.02	Urusan Perumahan (Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan)
		1.04.03	Urusan Perumahan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
1.05	Penataan Ruang	1.05.01	Urusan Penataan Ruang (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
		1.05.02	Urusan Penataan Ruang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
1.06	Perencanaan Pembangunan	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1.06.02	Urusan Perencanaan Pembangunan (Sekretariat Daerah)
		1.06.03	Urusan Perencanaan Pembangunan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
1.07	Perhubungan	1.07.01	Dinas Perhubungan dan Infokom
1.08	Lingkungan Hidup	1.08.01	Badan Lingkungan Hidup
		1.08.02	Urusan Lingkungan Hidup (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
		1.08.03	Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan
		1.08.04	Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Pertambangan dan Energi)
1.09	Pertanahan	1.09.01	Urusan Pertanahan (Sekretariat Daerah)
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.12.01	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
1.13	Sosial	1.13.01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.13.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.14	Ketenagakerjaan	1.14.01	Urusan Ketenagakerjaan (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
1.16	Penanaman Modal	1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.17	Kebudayaan	1.17.01	Urusan Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
		1.17.02	Urusan Kebudayaan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	1.18.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		1.18.02	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.19.02	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
		1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.19.04	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI
1	2	3	4
		1.19.05	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		1.20.02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
		1.20.03	Sekretariat Daerah
		1.20.04	Sekretariat DPRD
		1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1.20.06	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu)
		1.20.07	Inspektorat
		1.20.09	Badan Kepegawaian Daerah
		1.20.10	Kecamatan Siak
		1.20.11	Kecamatan Sungai Apit
		1.20.12	Kecamatan Minas
		1.20.13	Kecamatan Tualang
		1.20.14	Kecamatan Dayun
		1.20.15	Kecamatan Kerinci Kanan
		1.20.16	Kecamatan Bunga Raya
		1.20.17	Kecamatan Sungai Mandau
		1.20.18	Kecamatan Kandis
		1.20.19	Kecamatan Koto Gasib
		1.20.20	Kecamatan Lubuk Dalam
		1.20.21	Kecamatan Sabak Auh
		1.20.22	Kecamatan Mempura
		1.20.23	Kecamatan Pusako
		1.20.25	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
		1.20.26	Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
		1.20.27	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)
		1.20.28	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (Dinas Pertambangan dan Energi)
1.21	Ketahanan Pangan	1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		1.21.02	Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)
		1.21.03	Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan)
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.22.01	Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
		1.22.02	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sekretariat Daerah)
		1.22.03	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Siak)
		1.22.04	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Sungai Apit)
		1.22.05	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Minas)
		1.22.06	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Tualang)
		1.22.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Dayun)
		1.22.08	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Kerinci Kanan)
		1.22.09	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Bunga Raya)
		1.22.10	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Sungai Mandau)
		1.22.11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Kandis)
		1.22.12	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Koto Gasib)
		1.22.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Lubuk Dalam)
		1.22.14	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Sabak Auh)
		1.22.15	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Mempura)
		1.22.16	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kecamatan Pusako)
1.23	Statistik	1.23.01	Urusan Statistik (Sekretariat Daerah)
		1.23.02	Urusan Statistik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
1.24	Kearsipan	1.24.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip
		1.24.02	Urusan Kearsipan (Sekretariat Daerah)
1.25	Komunikasi dan Informatika	1.25.01	Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Perhubungan dan Infokom)
		1.25.02	Urusan Komunikasi dan Informatika (Sekretariat Daerah)
		1.25.03	Urusan Komunikasi dan Informatika (Sekretariat DPRD)
1.26	Perpustakaan	1.26.01	Urusan Perpustakaan (Kantor Perpustakaan dan Arsip)
		1.26.02	Urusan Perpustakaan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI
1	2	3	4
2	URUSAN PILIHAN		
2.01	Pertanian	2.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2.01.02	Urusan Pertanian (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan)
		2.01.03	Urusan Pertanian (Sekretariat Daerah)
		2.01.04	Urusan Pertanian (Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan)
2.02	Kehutanan	2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		2.02.02	Urusan Kehutanan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
		2.02.03	Urusan Kehutanan (Sekretariat Daerah)
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi
		2.03.02	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan)
2.04	Pariwisata	2.04.01	Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)
		2.04.02	Urusan Pariwisata (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)
2.05	Kelautan dan Perikanan	2.05.01	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
2.06	Perdagangan	2.06.01	Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan)
		2.06.02	Urusan Perdagangan (Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan)
2.07	Industri	2.07.01	Urusan Industri (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan)
2.08	Ketransmigrasian	2.08.01	Urusan Ketransmigrasian (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 49 Tahun 2015
Tanggal : 10 Desember 2015

**SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	URAIAN
1	2
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan

 BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 49 Tahun 2015

Tanggal : 10 Desember 2015

KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI
KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	
1	2
01	Pelayanan Umum
02	Pertanahan *)
03	Ketertiban dan Ketentraman
04	Ekonomi
05	Lingkungan Hidup
06	Perumahan dan Fasilitas Umum
07	Kesehatan
08	Pariwisata dan Budaya
09	Agama *)
10	Pendidikan
11	Perlindungan Sosial

Keterangan :

*) Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah

BUPATI SIAK, P

SYAMSUAR P

KODE DAN DAFTAR PROGRAM KEGIATAN
 MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2016

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
X XX	XX	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
X XX	XX	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
X XX	XX	01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
X XX	XX	01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
X XX	XX	01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
X XX	XX	01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
X XX	XX	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
X XX	XX	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
X XX	XX	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X XX	XX	01.10	Penyediaan alat tulis kantor
X XX	XX	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
X XX	XX	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
X XX	XX	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
X XX	XX	01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga
X XX	XX	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
X XX	XX	01.16	Penyediaan bahan logistik kantor
X XX	XX	01.17	Penyediaan makanan dan minuman
X XX	XX	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X XX	XX	01.19	Penyediaan jasa keamanan kantor
X XX	XX	01.20	Penyediaan jasa administrasi kantor
X XX	XX	01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
X XX	XX	01.22	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
X XX	XX	01.23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan
X XX	XX	01.24	Penyediaan jasa administrasi kantor teknis pertanahan
X XX	XX	01.25	Penataan dan Pengelolaan Arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah
X XX	XX	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
X XX	XX	02.01	Pembangunan rumah jabatan
X XX	XX	02.02	Pembangunan rumah dinas
X XX	XX	02.03	Pembangunan gedung kantor
X XX	XX	02.04	Pengadaan mobil jabatan
X XX	XX	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
X XX	XX	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
X XX	XX	02.10	Pengadaan mebeleur
X XX	XX	02.11	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya
X XX	XX	02.12	Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi
X XX	XX	02.13	Pengadaan peralatan pembangkit listrik dan kelengkapannya
X XX	XX	02.14	Pengadaan Instalasi udara
X XX	XX	02.15	Pengadaan Sarana Publikasi
X XX	XX	02.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan
X XX	XX	02.17	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur
X XX	XX	02.18	Pengadaan peralatan Satuan Pemadam Kebakaran
X XX	XX	02.19	Pengadaan Peralatan Satuan Pengamanan
X XX	XX	02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
X XX	XX	02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
X XX	XX	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
X XX	XX	02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
X XX	XX	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
X XX	XX	02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
X XX	XX	02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
X XX	XX	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
X XX	XX	02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi
X XX	XX	02.32	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
X XX	XX	02.33	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor
X XX	XX	02.34	Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
X XX	XX	02.35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan
X XX	XX	02.36	Pemeliharaan rutin/berkala sound system
X XX	XX	02.37	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum
X XX	XX	02.38	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
X XX	XX	02.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
X XX	XX	02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM KEGIATAN
 MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
X XX	XX	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
X XX	XX	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
X XX	XX	01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
X XX	XX	01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
X XX	XX	01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
X XX	XX	01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
X XX	XX	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
X XX	XX	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
X XX	XX	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X XX	XX	01.10	Penyediaan alat tulis kantor
X XX	XX	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
X XX	XX	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
X XX	XX	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
X XX	XX	01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga
X XX	XX	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
X XX	XX	01.16	Penyediaan bahan logistik kantor
X XX	XX	01.17	Penyediaan makanan dan minuman
X XX	XX	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X XX	XX	01.19	Penyediaan jasa keamanan kantor
X XX	XX	01.20	Penyediaan jasa administrasi kantor
X XX	XX	01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
X XX	XX	01.22	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
X XX	XX	01.23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan
X XX	XX	01.24	Penyediaan jasa administrasi kantor teknis pertanahan
X XX	XX	01.25	Penataan dan Pengelolaan Arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah
X XX	XX	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
X XX	XX	02.01	Pembangunan rumah jabatan
X XX	XX	02.02	Pembangunan rumah dinas
X XX	XX	02.03	Pembangunan gedung kantor
X XX	XX	02.04	Pengadaan mobil jabatan
X XX	XX	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
X XX	XX	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
X XX	XX	02.10	Pengadaan mebeleur
X XX	XX	02.11	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya
X XX	XX	02.12	Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi
X XX	XX	02.13	Pengadaan peralatan pembangkit listrik dan kelengkapannya
X XX	XX	02.14	Pengadaan instalasi udara
X XX	XX	02.15	Pengadaan Sarana Publikasi
X XX	XX	02.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan
X XX	XX	02.17	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur
X XX	XX	02.18	Pengadaan peralatan Satuan Pemadam Kebakaran
X XX	XX	02.19	Pengadaan Peralatan Satuan Pengamanan
X XX	XX	02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
X XX	XX	02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
X XX	XX	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
X XX	XX	02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
X XX	XX	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
X XX	XX	02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
X XX	XX	02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
X XX	XX	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
X XX	XX	02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
X XX	XX	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
X XX	XX	02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi
X XX	XX	02.32	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
X XX	XX	02.33	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor
X XX	XX	02.34	Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
X XX	XX	02.35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan
X XX	XX	02.36	Pemeliharaan rutin/berkala sound system
X XX	XX	02.37	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum
X XX	XX	02.38	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
X XX	XX	02.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
X XX	XX	02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
X XX XX	02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	
X XX XX	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
X XX XX	02.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	
X XX XX	02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	
X XX XX	02.45	Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa	
X XX XX	02.46	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	
X XX XX	02.47	Penyusunan DED	
X XX XX	02.48	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Gedung Peninggalan Bersejarah	
X XX XX	02.49	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak	
X XX XX	02.50	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah	
X XX XX	02.51	Pembangunan Gedung / Gudang Barang	
X XX XX	02.52	Pembangunan Gedung Pertemuan Serba Guna Pemerintah Kabupaten Siak	
X XX XX	02.53	Fasilitasi Penyusunan LPPD Kab.Siak	
X XX XX	02.54	Pengadaan kendaraan Khusus / Lainnya	
X XX XX	02.55	Pembuatan Pagar Workshop	
X XX XX	02.56	Pengadaan Sarana dan Prasarana E-KTP	
X XX XX	02.57	DED (Detail Engineering Design) Gedung Kantor Desa	
X XX XX	02.58	Penyusunan DED Rumah Dinas Jabatan Camat Siak	
X XX XX	02.59	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (SIPATEN)	
X XX XX	02.60	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Siak	
X XX XX	02.61	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sekolah Keagamaan	
X XX XX	02.62	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	
X XX XX	02.63	Penyusunan DED Fasilitas Perkantoran	
X XX XX	02.64	Perencanaan Teknis Semenisasi Kab. Siak	
X XX XX	02.65	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Lanscape	
X XX XX	02.66	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak	
X XX XX	02.67	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak	
X XX XX	02.68	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan	
X XX XX	02.69	Pembangunan Sekolah Keagamaan	
X XX XX	02.70	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	
X XX XX	02.71	Pembangunan Pasar Seni	
X XX XX	02.72	DED (Detail Engeneering Design) Pembangunan Gedung/Ruang	
X XX XX	02.73	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	
X XX XX	02.74	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	
X XX XX	02.75	Pembangunan Gedung Serba Guna di Wilayah Kecamatan	
X XX XX	02.76	Pembangunan Gedung Kantor Koramil	
X XX XX	02.77	Pembangunan Rumah Dinas di Wilayah Kecamatan	
X XX XX	02.78	Rehab Gedung Kantor KUA	
X XX XX	02.79	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Minas	
X XX XX	02.80	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Dayun	
X XX XX	02.81	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kandis	
X XX XX	02.82	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pusako	
X XX XX	02.83	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Siak	
X XX XX	02.84	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Tualang	
X XX XX	02.85	Pembangunan Gedung Diklat BKD	
X XX XX	02.86	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
X XX XX	02.87	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Kesehatan Daerah	
X XX XX	02.88	Pembangunan Lanscape dan Pagar Instalasi Farmasi Kabupaten	
X XX XX	02.89	Pekerjaan Interior Kantor	
X XX XX	02.90	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Publikasi	
X XX XX	02.91	Pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka	
X XX XX	02.92	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak	
X XX XX	02.93	Land Clearing Lahan Pemerintah Kab. Siak	
X XX XX	02.94	Pembangunan Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah	
X XX XX	02.95	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar istana siak	
X XX XX	02.96	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar masjid bersejarah	
X XX XX	02.97	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	
X XX XX	02.98	Timbunan di Wilayah Kecamatan	
X XX XX	02.99	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Mapolres Kab. Siak	
X XX XX	02.100	Pembangunan Kantor Lurah	
X XX XX	02.101	Penyusunan Dokumen AMDAL Makodim Kabupaten Siak	
X XX XX	02.102	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak	
X XX XX	02.103	Pembangunan Gedung Arsip	
X XX XX	02.104	Landscape Balairung (Pendopo) Perumahan Jabatan	
X XX XX	02.105	Pembangunan Air Mancur Kawasan Lapangan Maharatu Center	
X XX XX	02.106	Pembangunan Tempat Parkir, Taman (lanscape) Pengembangan Eks. Gedung Balai Tenun	
X XX XX	02.107	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	
X XX XX	02.108	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Dinas Jabatan Bupati Siak	
X XX XX	02.109	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PLTD pemda Kab.Siak	
X XX XX	02.110	Pemeliharaan/relokasi dan optimalisasi jaringan listrik dan kelengkapannya di Kab. Siak	
X XX XX	02.111	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Siak Televisi (Siak TV)	
X XX XX	02.112	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak	
X XX XX	02.113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi TV Relay Swasta Nasional Siak	
X XX XX	02.114	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Siak TV	
X XX XX	02.115	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	
X XX XX	02.116	Penyusunan UKL/UPL	
X XX XX	02.117	Pembangunan Lapangan Upacara Kantor Camat Sungai Apit	
X XX XX	02.118	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Tualang	
X XX XX	02.119	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kerinci Kanan	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
X XX	XX	02.120	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Siak
X XX	XX	03	Program peningkatan disiplin aparatur
X XX	XX	03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi
X XX	XX	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
X XX	XX	03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
X XX	XX	03.04	Pengadaan pakaian KORPRI
X XX	XX	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X XX	XX	03.06	Pengadaan Pakaian Kedaerahan
X XX	XX	03.07	Penyediaan jasa kesehatan jasmani/rohani pegawai
X XX	XX	03.08	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Jabatan
X XX	XX	03.09	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya
X XX	XX	03.10	Penyelenggaraan SKJ Pegawai di Lingkungan Kab. Siak
X XX	XX	03.11	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar
X XX	XX	04	Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS
X XX	XX	04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun
X XX	XX	04.02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
X XX	XX	04.03	Pemindahan tugas PNS
X XX	XX	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
X XX	XX	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal
X XX	XX	05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
X XX	XX	05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
X XX	XX	05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur
X XX	XX	05.05	Kegiatan penelitian mandiri (Fungsional)
X XX	XX	05.06	Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD
X XX	XX	05.07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
X XX	XX	05.08	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas
X XX	XX	05.09	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
X XX	XX	05.10	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan
X XX	XX	05.11	Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Kecamatan Se-Kab. Siak
X XX	XX	05.12	Pelatihan Pemberdayaan Aparatur Kecamatan
X XX	XX	05.13	Pembelajaran langsung pelayanan perizinan Kota Yogyakarta
X XX	XX	05.14	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas
X XX	XX	05.15	Konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan dibidang pendidikan
X XX	XX	05.16	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
X XX	XX	05.17	Bimbingan teknis dan diklat teknis kearsipan
X XX	XX	05.18	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah kabupaten siak
X XX	XX	05.19	Bimbingan teknis dan diklat teknis perpustakaan
X XX	XX	05.20	Pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan
X XX	XX	05.21	Bimbingan teknis pembekalan panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia (HAM) Kabupaten Siak
X XX	XX	05.22	Bimbingan teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN)
X XX	XX	05.23	Bimbingan teknis penyusunan dan perancangan MoU dan surat perjanjian
X XX	XX	05.24	Bimbingan teknis penegakan Peraturan Daerah bagi Satpol PP Kabupaten Siak
X XX	XX	05.25	Bimbingan teknis penegakan peraturan perundang-undangan bagi PPNS Kabupaten Siak
X XX	XX	05.26	Bimbingan teknis sistem informasi hukum (Siskum) peraturan perundang - undangan
X XX	XX	05.27	Bimbingan teknis pembekalan bagi aparatur pemerintah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
X XX	XX	05.28	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa
X XX	XX	05.29	Bimbingan teknis pelayanan publik
X XX	XX	05.30	Penyusunan analisa beban kerja
X XX	XX	05.31	Facilitasi penyelenggaraan pemerintah
X XX	XX	05.32	Sosialisasi standar pelayanan minimal
X XX	XX	05.33	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi SKPD
X XX	XX	05.34	Pelatihan dan Pendidikan Data Base dan Implementasi Paten bagi Aparatur Kecamatan
X XX	XX	05.35	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan.
X XX	XX	05.36	Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008
X XX	XX	05.37	Pelatihan/Training Pembentukan Karakter dan Budaya Kerja
X XX	XX	05.38	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
X XX	XX	05.39	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)
X XX	XX	05.40	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM III)
X XX	XX	05.41	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
X XX	XX	05.42	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik dalam bidang kependudukan
X XX	XX	05.43	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tentang Pelayanan dan Pencatatan Sipil
X XX	XX	05.44	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik tentang Peristiwa Kelahiran dan Pencatatan Sipil
X XX	XX	05.45	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kapasitas Perangkat Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi
X XX	XX	05.46	Sosialisasi revisi PP 41 tahun 2007 bagi perangkat daerah
X XX	XX	05.47	Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)
X XX	XX	05.48	Bimbingan teknis penilaian kinerja individu pegawai
X XX	XX	05.49	Bimbingan Teknis Strategi Pelayanan Prima
X XX	XX	05.50	Hari Ulang Tahun (HUT Satpol dan Linmas)
X XX	XX	05.51	Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
X XX	XX	05.52	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
X XX	XX	05.53	Bimbingan Teknis Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman
X XX	XX	05.54	Bimbingan Teknis Aparatur Pertanian
X XX	XX	05.55	Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian
X XX	XX	05.56	Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Pertanian
X XX	XX	05.57	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian
X XX	XX	05.58	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
X XX	XX	05.59	Pelatihan tentang Pengendalian Penyakit

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
X XX	XX	05.60	Pelatihan Petugas Promosi dan Kesehatan Keluarga
X XX	XX	05.61	Pelatihan Petugas Pelayanan Kesehatan
X XX	XX	05.62	Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
X XX	XX	05.63	Reward Petugas Pelayanan
X XX	XX	05.64	Pembinaan Kepada Lembaga Pelayanan Publik
X XX	XX	05.65	Pelatihan dan pendidikan aparaturnya kecamatan
X XX	XX	05.66	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik
X XX	XX	05.67	Sosialisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
X XX	XX	05.68	Sosialisasi Undang-undang ASN
X XX	XX	05.69	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)
X XX	XX	05.70	Bimbingan Teknis Penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
X XX	XX	05.71	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelolaan Kegiatan untuk Tingkat Dasar
X XX	XX	05.72	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa
X XX	XX	05.73	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan
X XX	XX	05.74	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)
X XX	XX	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
X XX	XX	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
X XX	XX	06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
X XX	XX	06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
X XX	XX	06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
X XX	XX	06.05	Penyusunan Laporan LAKIP
X XX	XX	06.06	Penyusunan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi
X XX	XX	06.07	Penyusunan Renstra
X XX	XX	06.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
X XX	XX	06.09	Monitoring dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
X XX	XX	06.10	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah
X XX	XX	06.11	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak
X XX	XX	06.12	Penyusunan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
X XX	XX	06.13	Facilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal
X XX	XX	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X XX	XX	07.01	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
X XX	XX	07.02	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
X XX	XX	07.03	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah
X XX	XX	07.04	Pendampingan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Sekolah
X XX	XX	08	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
X XX	XX	08.01	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan Instansi pemerintah / swasta
X XX	XX	08.02	Pengadaan sarana publikasi
X XX	XX	08.03	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca masyarakat secara khusus melalui pustaka keliling
X XX	XX	09	Program peningkatan kualitas kelembagaan
X XX	XX	09.01	Bimbingan sistem manajemen mutu
X XX	XX	09.02	Evaluasi dan pemeliharaan sistem bimbingan mutu
X XX	XX	09.03	Penyusunan SOP
X XX	XX	09.04	Rapat Koordinasi dan Orientasi Lembaga pemuda
X XX	XX	09.05	Sosialisasi Pemberdayaan Penyaluran Zakat
X XX	XX	09.06	Pembuatan Startegi Manajemen Perubahan
X XX	XX	09.07	Rakor Kelembagaan
X XX	XX	09.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
X XX	XX	09.09	Penyusunan Informasi dan Evaluasi Jabatan
X XX	XX	09.10	Facilitasi penyusunan ANJAB dan ABK
1			Urusan Wajib
101			Pendidikan
101	XX	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.01	Pembangunan gedung sekolah
101	XX	15.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	15.03	Penambahan ruang kelas sekolah
101	XX	15.04	Penambahan ruang guru sekolah
101	XX	15.05	Pembangunan ruang locker siswa
101	XX	15.06	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
101	XX	15.07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
101	XX	15.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
101	XX	15.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	15.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	15.11	Pembangunan ruang ibadah
101	XX	15.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
101	XX	15.13	Pembangunan jaringan Instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	15.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
101	XX	15.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
101	XX	15.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
101	XX	15.17	Pengadaan pakaian olahraga
101	XX	15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
101	XX	15.19	Pengadaan mebeluer sekolah
101	XX	15.20	Pengadaan perlengkapan sekolah
101	XX	15.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
101	XX	15.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
101	XX	15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
101	XX	15.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	15.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
101	XX	15.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
101	XX	15.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
101	XX	15.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
101	XX	15.29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
101	XX	15.30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
101	XX	15.31	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	15.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	15.33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
101	XX	15.34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
101	XX	15.35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	15.36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
101	XX	15.37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
101	XX	15.38	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
101	XX	15.39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
101	XX	15.40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
101	XX	15.41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
101	XX	15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
101	XX	15.43	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	15.44	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
101	XX	15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
101	XX	15.46	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
101	XX	15.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
101	XX	15.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
101	XX	15.49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
101	XX	15.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
101	XX	15.51	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	15.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	15.53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
101	XX	15.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
101	XX	15.55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	15.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
101	XX	15.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
101	XX	15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.60	Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.62	Pengembangan kurikulum; bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
101	XX	15.66	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
101	XX	16.01	Pembangunan gedung sekolah
101	XX	16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	16.03	Penambahan ruang kelas sekolah
101	XX	16.04	Penambahan ruang guru sekolah
101	XX	16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
101	XX	16.06	Pembangunan ruang locker siswa
101	XX	16.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
101	XX	16.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
101	XX	16.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	16.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	16.11	Pembangunan ruang ibadah
101	XX	16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
101	XX	16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
101	XX	16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
101	XX	16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
101	XX	16.17	Pengadaan pakaian olahraga
101	XX	16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
101	XX	16.19	Pengadaan mebeluer sekolah
101	XX	16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah
101	XX	16.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
101	XX	16.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
101	XX	16.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
101	XX	16.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	16.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
101	XX	16.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
101	XX	16.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
101	XX	16.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
101	XX	16.29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
101	XX	16.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	16.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	16.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
101	XX	16.33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
101	XX	16.34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	16.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
101	XX	16.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
101	XX	16.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
101	XX	16.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
101	XX	16.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
101	XX	16.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
101	XX	16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
101	XX	16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	16.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
101	XX	16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
101	XX	16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
101	XX	16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
101	XX	16.47	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
101	XX	16.48	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
101	XX	16.49	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
101	XX	16.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
101	XX	16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	16.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	16.53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
101	XX	16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
101	XX	16.55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
101	XX	16.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
101	XX	16.58	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
101	XX	16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum
101	XX	16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
101	XX	16.61	Pembinaan SMP Terbuka
101	XX	16.62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
101	XX	16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
101	XX	16.64	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
101	XX	16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
101	XX	16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS
101	XX	16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD
101	XX	16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
101	XX	16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
101	XX	16.70	Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa
101	XX	16.71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)
101	XX	16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
101	XX	16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
101	XX	16.74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
101	XX	16.75	Penyediaan beasiswa transisi
101	XX	16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
101	XX	16.77	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
101	XX	16.78	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	16.79	Pengadaan Mebeluer Sekolah Dasar (SD Sederajat)
101	XX	16.80	Pengadaan Mebeluer Sekoah Menengah Pertama (SMP Sederajat)
101	XX	16.81	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)
101	XX	16.82	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)
101	XX	16.83	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat Sekolah Dasar (SD)
101	XX	16.84	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat SMP/MTs
101	XX	16.85	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)
101	XX	16.86	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)
101	XX	17	Program Pendidikan Menengah
101	XX	17.01	Pembangunan gedung sekolah
101	XX	17.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	17.03	Penambahan ruang kelas sekolah
101	XX	17.04	Penambahan ruang guru sekolah
101	XX	17.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)
101	XX	17.06	Pembangunan ruang locker siswa
101	XX	17.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
101	XX	17.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
101	XX	17.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	17.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	17.11	Pembangunan ruang ibadah
101	XX	17.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
101	XX	17.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	17.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
101	XX	17.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
101	XX	17.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
101	XX	17.17	Pengadaan pakaian olahraga
101	XX	17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
101	XX	17.19	Pengadaan mebeluer sekolah
101	XX	17.20	Pengadaan perlengkapan sekolah
101	XX	17.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
101	XX	17.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
101	XX	17.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
101	XX	17.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	17.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
101	XX	17.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
101	XX	17.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
101	XX	17.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
101	XX	17.29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
101	XX	17.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	17.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	17.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
101	XX	17.33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
101	XX	17.34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	17.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
101	XX	17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
101	XX	17.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
101	XX	17.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
101	XX	17.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
101	XX	17.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
101	XX	17.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
101	XX	17.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	17.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
101	XX	17.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
101	XX	17.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
101	XX	17.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
101	XX	17.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
101	XX	17.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
101	XX	17.49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
101	XX	17.50	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	17.51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	17.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
101	XX	17.53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
101	XX	17.54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	17.55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
101	XX	17.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
101	XX	17.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
101	XX	17.58	Pelatihan penyusunan kurikulum
101	XX	17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
101	XX	17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan; terpencil dan kepulauan
101	XX	17.61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
101	XX	17.62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
101	XX	17.63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
101	XX	17.64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
101	XX	17.65	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
101	XX	17.66	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
101	XX	17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
101	XX	17.68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
101	XX	17.69	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	17.70	Pendidikan Life Skill SMA/MA
101	XX	17.71	Magang Peserta Didik di Bidang Pendidikan
101	XX	17.72	Pengadaan Mebeluer Sekolah Menengah (SMA Sederajat)
101	XX	17.73	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (SMA Sederajat)
101	XX	17.74	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat
101	XX	17.75	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Sederajat)
101	XX	17.76	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
101	XX	17.77	Pengadaan Meubiler Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
101	XX	17.78	Penyusunan AMDAL Pendidikan Menengah
101	XX	17.79	Pelaksanaan uji kompetensi keahlian SMK
101	XX	18	Program Pendidikan Non Formal
101	XX	18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
101	XX	18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
101	XX	18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
101	XX	18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan
101	XX	18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
101	XX	18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
101	XX	18.07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
101	XX	18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
101	XX	18.09	Pengembangan kurikulum; bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
101	XX	18.10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
101	XX	18.11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
101	XX	18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
101	XX	18.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	19	Program Pendidikan Luar Biasa
101	XX	19.01	Pembangunan gedung sekolah
101	XX	19.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	19.03	Penambahan ruang kelas sekolah
101	XX	19.04	Penambahan ruang guru sekolah
101	XX	19.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)
101	XX	19.06	Pembangunan ruang locker siswa
101	XX	19.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
101	XX	19.08	Pembangunan ruang serba guna/aula

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
101	XX	19.09	Pembangunan taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	19.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	19.11	Pembangunan ruang ibadah
101	XX	19.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
101	XX	19.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	19.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
101	XX	19.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
101	XX	19.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
101	XX	19.17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
101	XX	19.18	Pengadaan mebeluer sekolah
101	XX	19.19	Pengadaan perlengkapan sekolah
101	XX	19.20	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
101	XX	19.21	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
101	XX	19.22	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
101	XX	19.23	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	19.24	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
101	XX	19.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
101	XX	19.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
101	XX	19.27	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
101	XX	19.28	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
101	XX	19.29	Pemeliharaan rutin/berkala taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	19.30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	19.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
101	XX	19.32	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
101	XX	19.33	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	19.34	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
101	XX	19.35	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
101	XX	19.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
101	XX	19.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
101	XX	19.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
101	XX	19.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
101	XX	19.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
101	XX	19.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
101	XX	19.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah
101	XX	19.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
101	XX	19.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
101	XX	19.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
101	XX	19.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
101	XX	19.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
101	XX	19.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
101	XX	19.49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
101	XX	19.50	Rehabilitasi sedang/berat taman; lapangan upacara dan fasilitas parkir
101	XX	19.51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
101	XX	19.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
101	XX	19.53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
101	XX	19.54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
101	XX	19.55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
101	XX	19.56	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
101	XX	19.57	Pelatihan Penyusunan kurikulum
101	XX	19.58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
101	XX	19.59	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	19.60	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa
101	XX	19.61	Perlombaan melukis, bernyanyi, menghafal doa dan ayat ayat pendek bagi anak luar biasa pada acara peringatan hari besar nasional dan Islam
101	XX	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
101	XX	20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
101	XX	20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
101	XX	20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
101	XX	20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
101	XX	20.05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
101	XX	20.06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
101	XX	20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
101	XX	20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
101	XX	20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
101	XX	20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
101	XX	20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
101	XX	20.12	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	20.13	Magang Tenaga Pendidikan
101	XX	20.14	Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
101	XX	20.15	Pelatihan Guru Kewirausahaan dan Pengelola Unit Produksi (PUP) SMK
101	XX	20.16	Pengelolaan Program Keahlian SMK di Kabupaten Siak
101	XX	20.17	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Guru SD/MI
101	XX	20.18	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMP/MTs
101	XX	20.19	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMA/MA/SMK
101	XX	20.20	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
101	XX	20.21	Pembinaan OSN guru SD/MI, SLTP dan SLTA
101	XX	20.22	Pelatihan KTSP Bagi Pengawas
101	XX	20.23	Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Melalui Pelatihan Tingkat Dasar (Biaya Pendidik Kelas)(Sharing Propinsi)
101	XX	20.24	Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam untuk SD Sederajat dan SMP sederajat

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	
1		2	
101	XX	20.25	Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam untuk SMA Sederajat
101	XX	20.26	Diklat Calon Pengawas (Cawas)
101	XX	20.27	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru
101	XX	20.28	Peningkatan kompetensi pengawas fungsional pendidikan melalui pelatihan profesional kepengawasan dan laporan kinerja unit kerja
101	XX	20.29	Bimbingan Penulisan Karya Inovasi dan Publikasi Ilmiah
101	XX	20.30	Pelatihan Guru CPNS (Induksi)
101	XX	20.31	Mahir Lanjutan Kepramukaan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan
101	XX	20.32	Pertemuan pembina pramuka siaga, penggalang dan penegak (karang pamitran)
101	XX	20.33	Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN siswa SMA
101	XX	20.34	Pelatihan tematik bagi guru SD/MI
101	XX	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
101	XX	21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
101	XX	21.02	Pengembangan minat dan budaya baca
101	XX	21.03	Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
101	XX	21.04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
101	XX	21.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
101	XX	21.06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
101	XX	21.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
101	XX	21.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
101	XX	21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
101	XX	21.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
101	XX	22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
101	XX	22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
101	XX	22.03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
101	XX	22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
101	XX	22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan
101	XX	22.06	Pembinaan Komite Sekolah
101	XX	22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
101	XX	22.08	Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
101	XX	22.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
101	XX	22.10	Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA
101	XX	22.11	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas VI SD Khusus Mata Pelajaran UASBN
101	XX	22.12	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMP/MTs Khusus Mata Pelajaran UNAS
101	XX	22.13	Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI
101	XX	22.14	Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs
101	XX	22.15	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMA/MA Khusus Mata Pelajaran Unas
101	XX	22.16	Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UN/US SMA/MA/SMK
101	XX	22.17	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
101	XX	22.18	Pembuatan Data Base Pendidikan
101	XX	22.19	Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka
101	XX	22.20	Penyelenggaraan akreditasi pendidikan
101	XX	23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
101	XX	23.01	Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kab. Siak
101	XX	23.02	Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)
101	XX	24	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan
101	XX	24.01	Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan
102			Kesehatan
102	XX	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
102	XX	15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
102	XX	15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
102	XX	15.03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
102	XX	15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
102	XX	15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
102	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	15.07	Sosialisasi Penggunaan Obat yang Rasional dan Penyalahgunaan Obat Terapeutik Masyarakat
102	XX	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
102	XX	16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
102	XX	16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
102	XX	16.03	Pengadaan; peningkatan; dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
102	XX	16.04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
102	XX	16.05	Perbaikan gizi masyarakat
102	XX	16.06	Revitalisasi sistem kesehatan
102	XX	16.07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
102	XX	16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
102	XX	16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat
102	XX	16.10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
102	XX	16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
102	XX	16.12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
102	XX	16.13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
102	XX	16.14	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	16.15	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
102	XX	16.16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
102	XX	16.17	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
102	XX	16.18	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Polindes
102	XX	16.19	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas
102	XX	16.20	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Mandau
102	XX	16.21	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kandis
102	XX	16.22	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Slak
102	XX	16.23	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Mempura
102	XX	16.24	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan
102	XX	16.25	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Perawang
102	XX	16.26	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Tualang
102	XX	16.27	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Dayun
102	XX	16.28	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam
102	XX	16.29	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Koto Gasib
102	XX	16.30	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Apit
102	XX	16.31	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Bunga Raya
102	XX	16.32	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sabak Auh
102	XX	16.33	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Pusako
102	XX	16.34	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rerual Sistem
102	XX	16.35	Pelayanan Kesehatan pada Event-Event Resmi dan Hari-hari Besar
102	XX	16.36	Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
102	XX	16.37	Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Farmasi Kesehatan
102	XX	16.38	Penyelenggaraan Lokakarya Mini Puskesmas
102	XX	16.39	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus
102	XX	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
102	XX	17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
102	XX	17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
102	XX	17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
102	XX	17.04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
102	XX	17.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
102	XX	18.01	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
102	XX	18.02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
102	XX	18.03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
102	XX	18.04	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
102	XX	18.05	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
102	XX	18.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
102	XX	19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
102	XX	19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
102	XX	19.03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
102	XX	19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
102	XX	19.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	19.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
102	XX	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
102	XX	20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
102	XX	20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
102	XX	20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
102	XX	20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
102	XX	20.05	Penanggulangan Gizi-Lebih
102	XX	20.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	21	Program pengembangan lingkungan sehat
102	XX	21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
102	XX	21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
102	XX	21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
102	XX	21.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	21.05	Penyehatan Lingkungan
102	XX	21.06	Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas
102	XX	21.07	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Sehat
102	XX	22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
102	XX	22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
102	XX	22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
102	XX	22.03	Pengadaan vaksin penyakit menular
102	XX	22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
102	XX	22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
102	XX	22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
102	XX	22.07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
102	XX	22.08	Peningkatan Imunisasi
102	XX	22.09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
102	XX	22.10	Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
102	XX	22.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	22.12	Pengendalian Penyakit Menular Langsung
102	XX	22.13	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
102	XX	22.14	Pengendalian penyakit tidak menular
102	XX	22.15	Peningkatan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji
102	XX	22.16	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Kesehatan Matra
102	XX	22.17	Penyelenggaraan Penanggulangan HIV/AIDS
102	XX	23	Program standarisasi pelayanan kesehatan
102	XX	23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
102	XX	23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
102	XX	23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
102	XX	23.04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
102	XX	23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
102	XX	23.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	23.07	Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Untuk Puskesmas
102	XX	23.08	Penyelenggaraan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum (BLUD)
103	XX	23.09	Standarisasi, Akreditasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
102	XX	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
102	XX	24.01	Pelayanan operasi katarak
102	XX	24.02	Pelayanan kesehatan THT
102	XX	24.03	Pelayanan operasi bibir sumbing
102	XX	24.04	Pelayanan sunatan masal
102	XX	24.05	Penanggulangan ISPA
102	XX	24.06	Penanggulangan penyakit cacangan
102	XX	24.07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
102	XX	24.08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
102	XX	24.09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
102	XX	24.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	25	Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
102	XX	25.01	Pembangunan puskesmas
102	XX	25.02	Pembangunan puskesmas pembantu
102	XX	25.03	Pengadaan puskesmas perairan
102	XX	25.04	Pengadaan puskesmas keliling
102	XX	25.05	Pembangunan posyandu
102	XX	25.06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
102	XX	25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
102	XX	25.08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
102	XX	25.09	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
102	XX	25.10	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
102	XX	25.11	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
102	XX	25.12	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
102	XX	25.13	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
102	XX	25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
102	XX	25.15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
102	XX	25.16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
102	XX	25.17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
102	XX	25.18	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
102	XX	25.19	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
102	XX	25.20	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
102	XX	25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
102	XX	25.22	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	25.23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes
102	XX	25.24	Rehabilitasi Puskesmas
102	XX	25.25	Pengadaan Meubeleur Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes
102	XX	25.26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes dan Poskesdes
102	XX	25.27	Rehabilitasi Polindes dan Poskesdes
102	XX	26	Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
102	XX	26.01	Pembangunan rumah sakit
102	XX	26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
102	XX	26.03	Pembangunan gudang obat/apotik
102	XX	26.04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; Kelas I; II dan III)
102	XX	26.05	Pengembangan ruang gawat darurat
102	XX	26.06	Pengembangan ruang ICU; ICCU; NICU
102	XX	26.07	Pengembangan ruang operasi
102	XX	26.08	Pengembangan ruang terapi
102	XX	26.09	Pengembangan ruang isolasi
102	XX	26.10	Pengembangan ruang bersalin
102	XX	26.11	Pengembangan ruang inkubator
102	XX	26.12	Pengembangan ruang bayi
102	XX	26.13	Pengembangan ruang rontgen
102	XX	26.14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
102	XX	26.15	Pembangunan kamar jenazah
102	XX	26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
102	XX	26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
102	XX	26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
102	XX	26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
102	XX	26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2
102	XX	26.21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit
102	XX	26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)
102	XX	26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
102	XX	26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
102	XX	26.25 Pengembangan tipe rumah sakit
102	XX	26.26 Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	26.27 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Bedah
102	XX	26.28 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran kebidanan dan internis
102	XX	26.29 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran neurologi dan akuntupur
102	XX	26.30 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran radiologi
102	XX	26.31 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran laboratorium
102	XX	26.32 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran sterilisasi
102	XX	26.33 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran anak/perinatologi
102	XX	26.34 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran THT
102	XX	26.35 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan kedokteran Mata
102	XX	26.36 Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran UGD dan ICU
102	XX	26.37 Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Gigi
102	XX	26.38 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Anastesi
102	XX	26.39 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Peralatan Kedokteran Paru
102	XX	26.40 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Instalasi Gas Medis
102	XX	27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
102	XX	27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
102	XX	27.02 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
102	XX	27.03 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
102	XX	27.04 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; Kelas I; II dan III)
102	XX	27.05 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
102	XX	27.06 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU; ICCU; NICU
102	XX	27.07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
102	XX	27.08 Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
102	XX	27.09 Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
102	XX	27.10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
102	XX	27.11 Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
102	XX	27.12 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
102	XX	27.13 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
102	XX	27.14 Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
102	XX	27.15 Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
102	XX	27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
102	XX	27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
102	XX	27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
102	XX	27.19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit
102	XX	27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
102	XX	27.21 Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
102	XX	28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
102	XX	28.02 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
102	XX	28.03 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
102	XX	28.04 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
102	XX	28.05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
102	XX	28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
102	XX	28.07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
102	XX	28.08 Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	28.09 Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)
102	XX	28.10 Pendampingan dan Penunjang Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
102	XX	29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
102	XX	29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita
102	XX	29.02 Immunisasi bagi anak balita
102	XX	29.03 Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
102	XX	29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
102	XX	29.05 Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
102	XX	29.06 Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
102	XX	29.07 Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
102	XX	30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
102	XX	30.02 Rekrutmen tenaga perawat kesehatan
102	XX	30.03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
102	XX	30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
102	XX	30.05 Pembangunan panti asuhan
102	XX	30.06 Pelayanan kesehatan
102	XX	30.07 Monitoring; evaluasi dan pelaporan
102	XX	31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
102	XX	31.01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
102	XX	31.02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
102	XX	31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
102	XX	31.04 Monitoring; evaluasi dan pelaporan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
102	XX	31.05	Pengawasan dan Pengendalian Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman
102	XX	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
102	XX	32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
102	XX	32.02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
102	XX	32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.
102	XX	32.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
102	XX	32.05	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
102	XX	33	Program Pelayanan Kesehatan
102	XX	33.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
102	XX	33.02	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin di RSUD
102	XX	33.03	Penyelenggaraan Klinik VCT
102	XX	34	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
102	XX	34.01	Penyusunan standar pelayanan rumah sakit
102	XX	35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
102	XX	35.01	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
103			Pekerjaan Umum
103	XX	15	Program pembangunan jalan dan jembatan
103	XX	15.01	Perencanaan pembangunan jalan
103	XX	15.02	Survei kontur jalan dan jembatan
103	XX	15.03	Pembangunan jalan
103	XX	15.04	Perencanaan pembangunan jembatan
103	XX	15.05	Pembangunan jembatan
103	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	15.07	Peningkatan Jalan Siak - Tumang (DAK)
103	XX	15.08	Peningkatan Jalan Kecamatan Siak
103	XX	15.09	Pembangunan Jalan Kecamatan Siak
103	XX	15.10	Peningkatan Jalan Kecamatan Mempura
103	XX	15.11	Pembangunan Jalan Kecamatan Mempura
103	XX	15.12	Peningkatan Jalan Kecamatan Pusako
103	XX	15.13	Pembangunan Jalan Kecamatan Pusako
103	XX	15.14	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Apit
103	XX	15.15	Pembangunan Jalan Kecamatan Sungai Apit
103	XX	15.16	Peningkatan Jalan Kecamatan Bungaraya
103	XX	15.17	Pembangunan Jalan Kecamatan Bungaraya
103	XX	15.18	Peningkatan Jalan Kecamatan Sabak Auh
103	XX	15.19	Pembangunan Jalan Kecamatan Sabak Auh
103	XX	15.20	Peningkatan Jalan Kecamatan Dayun
103	XX	15.21	Pembangunan Jalan Kecamatan Dayun
103	XX	15.22	Peningkatan Jalan Kecamatan Koto Gasib
103	XX	15.23	Pembangunan Jalan Kecamatan Koto Gasib
103	XX	15.24	Peningkatan Jalan Kecamatan Lubuk Dalam
103	XX	15.25	Pembangunan Jalan Kecamatan Lubuk Dalam
103	XX	15.26	Peningkatan Jalan Kecamatan Kerinci Kanan
103	XX	15.27	Pembangunan Jalan Kecamatan Kerinci Kanan
103	XX	15.28	Peningkatan Jalan Kecamatan Tualang
103	XX	15.29	Pembangunan Jalan Kecamatan Tualang
103	XX	15.30	Peningkatan Jalan Kecamatan Minas
103	XX	15.31	Pembangunan Jalan Kecamatan Minas
103	XX	15.32	Peningkatan Jalan Kecamatan Kandis
103	XX	15.33	Pembangunan Jalan Kecamatan Kandis
103	XX	15.34	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	15.35	Pembangunan Jalan Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	15.36	Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak
103	XX	15.37	Pembangunan Jembatan Kecamatan Mempura
103	XX	15.38	Pembangunan Jembatan Kecamatan Pusako
103	XX	15.39	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sungai Apit
103	XX	15.40	Pembangunan Jembatan Kecamatan Bungaraya
103	XX	15.41	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sabak Auh
103	XX	15.42	Pembangunan Jembatan Kecamatan Koto Gasib
103	XX	15.43	Pembangunan Jembatan Kecamatan Lubuk Dalam
103	XX	15.44	Pembangunan Jembatan Kecamatan Kerinci Kanan
103	XX	15.45	Pembangunan Jembatan Kecamatan Tualang
103	XX	15.46	Pembangunan Jembatan Kecamatan Minas
103	XX	15.47	Pembangunan Jembatan Kecamatan Kandis
103	XX	15.48	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	15.49	DED Pembangunan Jalan Kabupaten Siak
103	XX	15.50	DED Pembangunan Jembatan Kabupaten Siak
104	XX	15.51	Peningkatan Jalan Kecamatan Dayun (DAK)
105	XX	15.52	Peningkatan Jalan Kecamatan Koto Gasib (DAK)
106	XX	15.53	Peningkatan Jalan Kecamatan Lubuk Dalam (DAK)
107	XX	15.54	Peningkatan Jalan Kecamatan Kerinci Kanan (DAK)
108	XX	15.55	Peningkatan Jalan Kecamatan Tualang (DAK)
109	XX	15.56	Peningkatan Jalan Kecamatan Kandis (DAK)
103	XX	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
103	XX	16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
103	XX	16.02	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
103	XX	16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
103	XX	16.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	16.05	Pembangunan Drainase Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)
103	XX	16.06	Pembangunan Drainase Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)
103	XX	16.07	Pembangunan Drainase Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)
103	XX	16.08	Pembangunan Drainase Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)
103	XX	17	Program pembangunan turap/talud/bronjong
103	XX	17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong
103	XX	17.02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
103	XX	17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong
103	XX	17.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	17.05	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Siak
103	XX	17.06	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Mempura
103	XX	17.07	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Bungaraya
103	XX	17.08	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Tualang
103	XX	17.09	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	17.10	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Koto Gasib
103	XX	17.11	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sungai Apit
103	XX	17.12	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Pusako
103	XX	17.13	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sabak Auh
103	XX	17.14	Pembangunan Plasa Turap Depan Istana
103	XX	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
103	XX	18.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
103	XX	18.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
103	XX	18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
103	XX	18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
103	XX	18.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	18.06	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Siak
103	XX	18.07	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Siak
103	XX	18.08	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Dayun
103	XX	18.09	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Dayun
103	XX	18.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Mempura
103	XX	18.11	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Mempura
103	XX	18.12	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Koto Gasib
103	XX	18.13	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Koto Gasib
103	XX	18.14	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	18.15	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	18.16	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Sungai Apit
103	XX	18.17	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Sungai Apit
103	XX	18.18	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Tualang
103	XX	18.19	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Tualang
103	XX	18.20	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Pusako
103	XX	18.21	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Pusako
103	XX	18.22	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Lubuk Dalam
103	XX	18.23	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Lubuk Dalam
103	XX	18.24	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Bungaraya
103	XX	18.25	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Bungaraya
103	XX	18.26	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Sabak Auh
103	XX	18.27	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Sabak Auh
103	XX	18.28	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Kerinci Kanan
103	XX	18.29	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Kerinci Kanan
103	XX	18.30	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kecamatan Kandis
103	XX	18.31	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kecamatan Kandis
103	XX	18.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah I
103	XX	18.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah II
103	XX	18.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah III
103	XX	18.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah IV
103	XX	18.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Siak Wilayah V
103	XX	19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
103	XX	19.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
103	XX	19.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
103	XX	20.01	Inspeksi kondisi jalan
103	XX	20.02	Inspeksi kondisi jembatan
103	XX	20.03	Evaluasi dan pelaporan
103	XX	21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan
103	XX	21.01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
103	XX	21.02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
103	XX	21.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
103	XX	22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan
103	XX	22.02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
103	XX	22.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
103	XX	23.01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
103	XX	23.02	Pembangunan gedung workshop
103	XX	23.03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
103	XX	23.04	Pengadaan alat-alat berat
103	XX	23.05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
103	XX	23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
103	XX	23.07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
103	XX	23.08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
103	XX	23.09	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
103	XX	23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
103	XX	23.11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
103	XX	23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
103	XX	23.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
103	XX	24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
103	XX	24.02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
103	XX	24.03	Perencanaan pembangunan reservoir
103	XX	24.04	Perencanaan pembangunan pintu air
103	XX	24.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai
103	XX	24.06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
103	XX	24.07	Pembangunan reservoir
103	XX	24.08	Pembangunan pintu air
103	XX	24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
103	XX	24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
103	XX	24.11	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
103	XX	24.12	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
103	XX	24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
103	XX	24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
103	XX	24.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
103	XX	24.16	Pemberdayaan petani pemakai air
103	XX	24.17	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	24.18	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pintu air Kecamatan Bungaraya
103	XX	24.19	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pintu air Kecamatan Sabak Auh
103	XX	24.20	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pintu air Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	24.21	Pembuatan bangunan pintu air dan box culvert desa benteng hulu
103	XX	24.22	Pembangunan jaringan pengairan sistem pompanisasi kecamatan sabak auh (tahap II)
104	XX	24.23	peningkatan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Rawa Rempak Belading Kecamatan Sabak Auh (DAK)
103	XX	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
103	XX	25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
103	XX	25.02	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
103	XX	25.03	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
103	XX	25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah
103	XX	25.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
103	XX	25.06	Peningkatan distribusi penyediaan air baku
103	XX	25.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	25.08	Pembuatan Embung Untuk Persediaan Air Kabupaten Siak
103	XX	26	Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
103	XX	26.01	Pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya
103	XX	26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung; dan bangunan penampung air lainnya
103	XX	26.03	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
103	XX	26.04	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
103	XX	26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai; danau; dan sumber daya air lainnya
103	XX	26.06	Peningkatan konservasi air tanah
103	XX	26.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
103	XX	27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
103	XX	27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
103	XX	27.03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
103	XX	27.04	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
103	XX	27.05	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
103	XX	27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum
103	XX	27.07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
103	XX	27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
103	XX	27.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	27.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Air Minum
103	XX	27.11	Pengadaan sarana dan prasarana air minum
103	XX	27.12	Peningkatan Pelayanan Air Minum
103	XX	27.13	Pendidikan dan Pelatihan Personil UPTD SPAM
103	XX	27.14	Pamsimas Kabupaten Siak
103	XX	27.15	Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak
103	XX	27.16	Perencanaan SPAM dan Jaringan Kab. Siak
103	XX	28	Program Pengendalian Banjir

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
103	XX	28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir
103	XX	28.02	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
103	XX	28.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
103	XX	28.04	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
103	XX	28.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
103	XX	28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
103	XX	28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
103	XX	28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
103	XX	28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai
103	XX	28.10	Pembangunan tanggul pemecah ombak
103	XX	28.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	28.12	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Siak
103	XX	28.13	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sungai Apit
103	XX	28.14	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Mempura
103	XX	28.15	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Tualang
103	XX	28.16	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sabak Auh
103	XX	28.17	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sungai Mandau
103	XX	28.18	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Pusako
103	XX	28.19	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Bungaraya
103	XX	28.20	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Kandis
103	XX	28.21	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Koto Gasib
103	XX	28.22	Normalisasi Saluran/Sungai Kabupaten Siak
104	XX	28.23	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Minas
103	XX	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
103	XX	29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur
103	XX	29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
103	XX	29.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
103	XX	30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
103	XX	30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
103	XX	30.03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
103	XX	30.04	Pembangunan pasar perdesaan
103	XX	30.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
103	XX	30.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
103	XX	30.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan
103	XX	30.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
103	XX	30.09	Dana Pendampingan RIS-PNPM, Pendampingan PPIP dan Biaya Operasional PPSP Kab. Siak
104			Perumahan
104	XX	15	Program Pengembangan Perumahan
104	XX	15.01	Penetapan kebijakan; strategi; dan program perumahan
104	XX	15.02	Penyusunan Norma; Standar; Pedoman; dan Manual (NSPM)
104	XX	15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
104	XX	15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
104	XX	15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
104	XX	15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
104	XX	15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
104	XX	15.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
104	XX	15.09	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya) (Swakelola)
104	XX	15.10	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib) (Swakelola)
104	XX	15.11	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang) (Swakelola)
104	XX	15.12	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau) (Swakelola)
104	XX	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan
104	XX	16.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
104	XX	16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
104	XX	16.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
104	XX	16.04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
104	XX	16.05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
104	XX	16.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
104	XX	16.07	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)
104	XX	16.08	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)
104	XX	16.09	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)
104	XX	16.10	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)
104	XX	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
104	XX	17.01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
104	XX	17.02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
104	XX	17.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
104	XX	17.04	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
104	XX	17.05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
104	XX	17.06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
104	XX	17.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
104	XX	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
104	XX	18.01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
104	XX	18.02	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
104	XX	18.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
104	XX	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.01	Penyusunan norma; standar; prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.02	Sosialisasi norma; standar; prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.03	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
104	XX	19.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
104	XX	19.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
104	XX	19.06	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran.
104	XX	19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
104	XX	19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
104	XX	19.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
104	XX	19.14	Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
104	XX	19.15	Peringatan HUT Pemadam Kebakaran/Rakornas Damkar
104	XX	20	Program pengelolaan areal pemakaman
104	XX	20.01	Penyusunan kebijakan; norma; standar; prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
104	XX	20.02	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
104	XX	20.03	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
104	XX	20.04	Koordinasi penataan areal pemakaman
104	XX	20.05	Pemberian perijinan pemakaman
104	XX	20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
104	XX	20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
104	XX	20.08	Monitoring dan evaluasi
105			Penataan Ruang
105	XX	15	Program Perencanaan Tata Ruang
105	XX	15.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
105	XX	15.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK; RTRK; dan RTBL
105	XX	15.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
105	XX	15.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
105	XX	15.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
105	XX	15.06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
105	XX	15.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
105	XX	15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
105	XX	15.09	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
105	XX	15.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
105	XX	15.11	Revisi rencana tata ruang
105	XX	15.12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
105	XX	15.13	Survey dan pemetaan
105	XX	15.14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
105	XX	15.15	Monitoring; evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
105	XX	15.16	Review RTRW Kabupaten Siak
105	XX	15.17	Study Pemanfaatan Cagar Biosfir Giam Siak Kecil
105	XX	16	Program Pemanfaatan Ruang
105	XX	16.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
105	XX	16.02	Penyusunan norma; standar; dan kriteria pemanfaatan ruang
105	XX	16.03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
105	XX	16.04	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
105	XX	16.05	Survey dan pemetaan
105	XX	16.06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
105	XX	16.07	Sosialisasi kebijakan; norma; standar; prosedur dan manual pemanfaatan ruang
105	XX	16.08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
105	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
105	XX	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
105	XX	17.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
105	XX	17.02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
105	XX	17.03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
105	XX	17.04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
105	XX	17.05	Pengawasan pemanfaatan ruang
105	XX	17.06	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
105	XX	17.07	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
105	XX	17.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
105	XX	17.09	Pengadaan Sarana Publikasi
106			Perencanaan Pembangunan
106	XX	15	Program pengembangan data/informasi
106	XX	15.01	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
106	XX	15.02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
106	XX	15.03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
106	XX	15.04	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
106	XX	15.05	Penyusunan profile daerah
106	XX	15.06	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi spasial
106	XX	15.07	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
107	XX	15.08	Pembuatan Aplikasi Data Kabupaten Siak
106	XX	16	Program kerjasama pembangunan
106	XX	16.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
106	XX	16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara
106	XX	16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
106	XX	16.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
106	XX	16.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	16.06	Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Kerjasama Antar Daerah
106	XX	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
106	XX	17.01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
106	XX	17.02	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
106	XX	17.03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
106	XX	17.04	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
106	XX	17.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
106	XX	18.01	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
106	XX	18.02	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
106	XX	18.03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
106	XX	18.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
106	XX	19.01	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
106	XX	19.02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
106	XX	19.03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
106	XX	19.04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
106	XX	19.05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
106	XX	19.06	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
106	XX	19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
106	XX	19.08	Koordinasi perencanaan penanganan perpikiran
106	XX	19.09	Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan
106	XX	19.10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
106	XX	19.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
106	XX	20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
106	XX	20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
106	XX	20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
106	XX	20.04	Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
106	XX	21	Program perencanaan pembangunan daerah
106	XX	21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
106	XX	21.02	Penyusunan rancangan RPJPD
106	XX	21.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
106	XX	21.04	Penetapan RPJPD
106	XX	21.05	Penyusunan rancangan RPJMD
106	XX	21.06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
106	XX	21.07	Penetapan RPJMD
106	XX	21.08	Penyusunan rancangan RKPD
106	XX	21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
106	XX	21.10	Penetapan RKPD
106	XX	21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
106	XX	21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
106	XX	21.13	Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
106	XX	21.14	Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah
106	XX	21.15	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)
106	XX	21.16	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan
106	XX	21.17	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 5 tahun
106	XX	21.18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
106	XX	21.19	Verifikasi Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
106	XX	21.20	Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
106	XX	21.21	Penyusunan Renstra SKPD
106	XX	21.22	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perencanaan Pembangunan Daerah
106	XX	21.23	Pengadaan Sistem Informasi Terintegrasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
106	XX	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
106	XX	22.01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
106	XX	22.02	Penyusunan indikator ekonomi daerah
106	XX	22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
106	XX	22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
106	XX	22.05	Penyusunan tabel input output daerah
106	XX	22.06	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
106	XX	22.07	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
106	XX	22.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	22.09	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Siak
106	XX	22.10	Study Pengembangan kawasan pertanian holtikultura
106	XX	22.11	Kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat
106	XX	22.12	Kajian pengembangan tanaman sagu rakyat daerah pesisir kabupaten siak

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
106	XX	22.13	Survey perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan keuangan
106	XX	22.14	Kajian Perencanaan Pembangunan Ekonomi
106	XX	22.15	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
106	XX	23	Program perencanaan sosial dan budaya
106	XX	23.01	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi
106	XX	23.02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
106	XX	23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
106	XX	23.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	23.05	Koordinasi Penyusunan RAD PPK Kabupaten Siak
106	XX	23.06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia
106	XX	23.07	Studi kelayakan pendirian unit rumah sakit baru di kabupaten siak
106	XX	23.08	Kajian peningkatan dan pengembangan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia
106	XX	23.09	Survey perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan sumber daya manusia
106	XX	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
106	XX	24.01	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
106	XX	24.02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
106	XX	24.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
106	XX	24.04	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum
106	XX	24.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
106	XX	24.06	Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Siak
106	XX	24.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan MP3EI
106	XX	24.08	Review RUKD Kabupaten Siak
106	XX	24.09	Survey perencanaan pembngunan bidang Infrastruktur dan prasarana wilayah
106	XX	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
106	XX	25.01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
106	XX	25.02	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
106	XX	25.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
107			Perhubungan
107	XX	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
107	XX	15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
107	XX	15.02	Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang perhubungan
107	XX	15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
107	XX	15.04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
107	XX	15.05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
107	XX	15.06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai; danau dan penyeberangan
107	XX	15.07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
107	XX	15.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
107	XX	15.09	Penyusunan Dokumen Amdal
107	XX	15.10	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Di Kabupaten Siak
107	XX	15.11	Perencanaan Keselamatan Bidang Transportasi Jalan
107	XX	15.12	Perencanaan Studi Kelayakan Terminal
107	XX	15.13	Peningkatan Pengelolaan Terminal Pelabuhan Buton
107	XX	15.14	Peningkatan Pengelolaan Terminal Pelabuhan Siak
107	XX	15.15	Peningkatan Pengelolaan Terminal Pelabuhan Buatn
107	XX	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
107	XX	16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
107	XX	16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
107	XX	16.03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
107	XX	16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
107	XX	16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
107	XX	17	Program peningkatan pelayanan angkutan
107	XX	17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
107	XX	17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
107	XX	17.03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.
107	XX	17.04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
107	XX	17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.
107	XX	17.06	Kegiatan penciptaan kemandirian dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.
107	XX	17.07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
107	XX	17.08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
107	XX	17.09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal.
107	XX	17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat; tepat; murah dan mudah
107	XX	17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
107	XX	17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
107	XX	17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
107	XX	17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
107	XX	17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
107	XX	17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
107	XX	17.17	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
107	XX	17.18	Koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
107	XX	17.19	Koordinasi penilaian kota tertib lalu lintas
107	XX	17.20	Pengoperasian dan pemeliharaan bus sekolah dan angkutan umum
107	XX	18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
107	XX	18.01	Pembangunan gedung terminal

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
107	XX	18.02	Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal
107	XX	18.03	Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal
107	XX	18.04	Pembangunan Taman Lalu Lintas
107	XX	18.05	Pembangunan Dermaga Penyeberangan
107	XX	18.06	Pembangunan Pelabuhan Siak
107	XX	18.07	Pembangunan Pelabuhan Rakyat
107	XX	18.08	Pembangunan dermaga penyeberangan Ro-Ro
107	XX	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
107	XX	19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
107	XX	19.02	Pengadaan marka jalan
107	XX	19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan
107	XX	19.04	Penunjang operasional kegiatan pemerintah daerah
107	XX	19.05	Pemanduan pejabat dan tamu-tamu daerah
107	XX	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
107	XX	20.01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
107	XX	20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
107	XX	20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
108			Lingkungan Hidup
108	XX	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
108	XX	15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
108	XX	15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
108	XX	15.03	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
108	XX	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
108	XX	15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
108	XX	15.06	Bimbingan teknis persampahan
108	XX	15.07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
108	XX	15.08	Kerjasama pengelolaan sampah
108	XX	15.09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
108	XX	15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
108	XX	15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
108	XX	15.12	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	15.13	Pembangunan TPA Tualang
108	XX	15.14	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA Kabupaten Siak
108	XX	15.15	Pembangunan/Peningkatan TPA Kabupaten Siak
108	XX	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
108	XX	16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
108	XX	16.02	Koordinasi penilaian langit biru
108	XX	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan
108	XX	16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
108	XX	16.05	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
108	XX	16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
108	XX	16.07	Pengkajian dampak lingkungan
108	XX	16.08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
108	XX	16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
108	XX	16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
108	XX	16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan
108	XX	16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
108	XX	16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL
108	XX	16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
108	XX	16.15	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
108	XX	16.16	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	16.17	Kegiatan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup
108	XX	16.18	Kegiatan Penilaian AMDAL
108	XX	16.19	Kegiatan Pengawasan AMDAL
108	XX	16.20	Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
108	XX	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
108	XX	17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
108	XX	17.02	Pantai dan Laut Lestari
108	XX	17.03	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut; Suaka Perikanan; dan Keanekaragaman Hayati Laut
108	XX	17.04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
108	XX	17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
108	XX	17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
108	XX	17.07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
108	XX	17.08	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
108	XX	17.09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
108	XX	17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
108	XX	17.11	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
108	XX	17.12	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
108	XX	17.13	Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
108	XX	17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
108	XX	17.15	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
108	XX	17.16	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	17.17	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Kerusakan Ekosistem Gambut
108	XX	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
108	XX	18.01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk
108	XX	18.02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
108	XX	18.03	Rehabilitasi hutan dan lahan
108	XX	18.04	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
108	XX	18.05	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang; mangrove; dan padang lamun
108	XX	18.06	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang; mangrove; dan padang lamun
108	XX	18.07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
108	XX	18.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
108	XX	19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
108	XX	19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan
108	XX	19.03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
108	XX	19.04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
108	XX	19.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	19.06	Pekan lingkungan hidup Indonesia dalam rangka hari lingkungan hidup
108	XX	19.07	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
108	XX	20	Program peningkatan pengendalian polusi
108	XX	20.01	Pengujian emisi kendaraan bermotor
108	XX	20.02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
108	XX	20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
108	XX	20.04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
108	XX	20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
108	XX	20.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
108	XX	21.01	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi
108	XX	21.02	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
108	XX	21.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	22	Program pengendalian kebakaran hutan
108	XX	22.01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
108	XX	22.02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
108	XX	22.03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
108	XX	22.04	Penyusunan norma; standar; prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
108	XX	22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
108	XX	22.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
108	XX	23	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
108	XX	23.01	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
108	XX	23.02	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
108	XX	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
108	XX	24.01	Penyusunan kebijakan; norma; standard; prosedur dan manual pengelolaan RTH
108	XX	24.02	Sosialisasi kebijakan; norma; standard; prosedur dan manual pengelolaan RTH
108	XX	24.03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
108	XX	24.04	Penyusunan program pengembangan RTH
108	XX	24.05	Penataan RTH
108	XX	24.06	Pemeliharaan RTH
108	XX	24.07	Pengembangan taman rekreasi
108	XX	24.08	Pengawasan dan pengendalian RTH
108	XX	24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
108	XX	24.10	Monitoring dan evaluasi
108	XX	24.11	Pembangunan taman rekreasi di Kecamatan Siak
108	XX	24.12	Pembangunan taman rekreasi di Kecamatan Mempura
108	XX	24.13	Pembangunan taman rekreasi di Kecamatan Tualang
109			Pertanahan
109	XX	15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
109	XX	15.01	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
109	XX	15.02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
109	XX	16	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
109	XX	16.01	Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
109	XX	16.02	Penyuluhan hukum pertanahan
109	XX	16.03	Evaluasi Batas HGU Perusahaan di Kabupaten Siak
109	XX	16.04	Pengukuran/Pengusulan Pembuatan Sertifikat Tanah Pemda
109	XX	16.05	Informasi Tanah Desa
109	XX	16.06	Inventarisasi Lahan Pangan Berkelanjutan
109	XX	16.07	Sertifikasi Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak
109	XX	16.08	Sertifikasi Lahan Pangan Berkelanjutan
109	XX	16.09	Identifikasi, inventarisasi dan pengusulan pembuatan sertifikat tanah pemda kab. siak
109	XX	16.10	Informasi tanah desa di Kecamatan Koto Gasib
109	XX	16.11	Informasi tanah desa di Kecamatan Bungaraya
109	XX	16.12	Informasi tanah desa di Kecamatan Siak
109	XX	16.13	Informasi tanah desa di Kecamatan Tualang
109	XX	16.14	Informasi tanah desa di Kecamatan Sabak Auh
109	XX	16.15	Informasi tanah desa di Kecamatan Lubuk Dalam
109	XX	16.16	Informasi tanah desa di Kecamatan Pusako

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
109	XX	16.17	Informasi tanah desa di Kecamatan Mempura
109	XX	16.18	Informasi tanah desa di Kecamatan Dayun
109	XX	16.19	Sertifikasi lahan pangan berkelanjutan (sawah) di Kabupaten Siak
109	XX	16.20	Inventarisasi lahan pangan berkelanjutan (sawah) di Kabupaten Siak
109	XX	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
109	XX	1.701	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
109	XX	18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan
109	XX	18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
109	XX	18.02	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Survei dan Pemetaan Program Pengolahan Data GPS Berbasis SIG bagi Aparatur SKPD,Kecamatan, dan Desa
109	XX	18.03	Peningkatan Kemampuan Materi Teknis Aparatur Pengukuran Pemetaan dan SIG Bagian Pertanahan Setda Kab. Siak
109	XX	18.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi Pertanahan
109	XX	18.05	Identifikasi, Inventarisasi nama unsur rupabumi di Kabupaten Siak
109	XX	18.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Survei dan Pemetaan Program GPS bagi Aparatur SKPD,Kecamatan, dan Desa se Kabupaten Siak
109	XX	18.07	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Survei dan Pemetaan Program pengolahan data untuk aparat desa dan kelurahan kabupaten siak
109	XX	18.08	Peningkatan perawatan dan pemeliharaan tugu batas di kecamatan siak dan kecamatan bungaraya
109	XX	18.09	Peningkatan perawatan dan pemeliharaan tugu batas di kecamatan siak dan kecamatan sungai mandau
109	XX	18.10	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak
109	XX	19	Program batas wilayah pemerintahan
109	XX	19.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
110			Kependudukan dan Catatan Sipil
110	XX	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
110	XX	15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
110	XX	15.02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
110	XX	15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun; updating dan pemeliharaan)
110	XX	15.04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
110	XX	15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
110	XX	15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
110	XX	15.07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
110	XX	15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
110	XX	15.09	Pengembangan data base kependudukan
110	XX	15.10	Penyusunan kebijakan kependudukan
110	XX	15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
110	XX	15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan
110	XX	15.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
110	XX	15.14	Penataan dan Pengelolaan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
110	XX	15.15	Pelayanan Akte Kawin/Nikah Melalui Sidang Itsbat
110	XX	15.16	Pelayanan KTP_el Keliling (Masyarakat dan Sekolah)
110	XX	15.17	Pengembangan Database Kependudukan
110	XX	15.18	Pembuatan dan Cetak Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
110	XX	15.19	Penataan Jaringan Informatika dan Teknologi Kependudukan
110	XX	15.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Siak dan e-KTP
111			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
111	XX	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
111	XX	15.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
111	XX	15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
111	XX	15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
111	XX	15.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
111	XX	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
111	XX	16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
111	XX	16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
111	XX	16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
111	XX	16.04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
111	XX	16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
111	XX	16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
111	XX	16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG
111	XX	16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
111	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
111	XX	16.10	Fasilitasi Forum Anak
111	XX	16.11	Kajian tingkat kekerasan anak di Kabupaten Siak
111	XX	16.12	Operasional dan Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
111	XX	16.13	Pelatihan TOT PNBAL (Program Nasional Bagi Anak Indonesia)
111	XX	16.14	Profil Anak Kabupaten Siak
111	XX	16.15	Profil Perempuan Kabupaten Siak
111	XX	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
111	XX	17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
111	XX	17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
111	XX	17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
111	XX	17.04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
111	XX	17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
111	XX	17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
111	XX	17.07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
111	XX	17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
111	XX	17.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
111	XX	17.10	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Lansia
111	XX	17.11	Pemberdayaan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
111	XX	17.12	Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Siak
111	XX	17.13	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
111	XX	17.14	Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (PHI)
111	XX	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
111	XX	18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
111	XX	18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
111	XX	18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
111	XX	18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
111	XX	18.05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
111	XX	18.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
111	XX	18.07	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsip Gender (PPRG)
111	XX	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
111	XX	19.01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
111	XX	19.02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
111	XX	20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak
111	XX	20.01	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
111	XX	20.02	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional
111	XX	20.03	Pembinaan Potensi dan Partisipasi Anak
111	XX	20.04	Pelatihan TOT (Tarining of Trainer)
111	XX	20.05	Pengembangan Minat Bakat Anak
111	XX	20.06	Penyelenggaraan Perlindungan Anak
112			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
112	XX	15	Program Keluarga Berencana
112	XX	15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
112	XX	15.02	Pelayanan KIE
112	XX	15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
112	XX	15.04	Promosi Pelayanan Khiba
112	XX	15.05	Pembinaan Keluarga Berencana
112	XX	15.06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
112	XX	15.07	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Momen Khusus
112	XX	15.08	Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga
112	XX	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
112	XX	16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
112	XX	16.02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
112	XX	16.03	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi Remaja (Pembinaan Kelompok PIK - KRR)
112	XX	17	Program pelayanan kontrasepsi
112	XX	17.01	Pelayanan konseling KB
112	XX	17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
112	XX	17.03	Pengadaan alat kontrasepsi
112	XX	17.04	Pelayanan KB medis operasi
112	XX	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
112	XX	18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
112	XX	18.02	Orientasi Pendapatan Keluarga
112	XX	18.03	Penyediaan Data Keluarga
112	XX	19	Program promosi kesehatan ibu; bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
112	XX	19.01	Penyuluhan kesehatan ibu; bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
112	XX	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
112	XX	20.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
112	XX	20.02	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
112	XX	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS
112	XX	21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
112	XX	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
112	XX	22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
112	XX	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
112	XX	23.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
112	XX	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
112	XX	24.01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
112	XX	24.02	Pembinaan dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
113			Sosial
113	XX	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
113	XX	15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
113	XX	15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
113	XX	15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
113	XX	15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
113	XX	15.05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
113	XX	15.06	Peningkatan Kesejahteraan PMKS
113	XX	15.07	Identifikasi dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS
113	XX	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
113	XX	16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
113	XX	16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak
113	XX	16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
113	XX	16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan; anak cacat; dan anak nakal
113	XX	16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
113	XX	16.06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
113	XX	16.07	Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana bagi lanjut usia
113	XX	16.08	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat dan Eks Ttrauma
113	XX	16.09	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi tuna sosial
113	XX	16.10	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi WRSE dan Psikotik
113	XX	16.11	Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)
113	XX	17	Program pembinaan anak terlantar
113	XX	17.01	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
113	XX	17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
113	XX	17.03	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
113	XX	17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
113	XX	17.05	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
113	XX	17.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
113	XX	17.07	Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak
113	XX	17.08	Pelayanan kesejahteraan sosial anak
113	XX	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
113	XX	18.01	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
113	XX	18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
113	XX	18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
113	XX	18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
113	XX	18.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
113	XX	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
113	XX	19.01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
113	XX	19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo
113	XX	19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
113	XX	19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
113	XX	19.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
113	XX	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)
113	XX	20.01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
113	XX	20.02	Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
113	XX	20.03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
113	XX	20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
113	XX	20.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
113	XX	20.06	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan
113	XX	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
113	XX	21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
113	XX	21.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
113	XX	21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
113	XX	21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
113	XX	21.05	Pencetakan buku-buku pahlawan Nasional
113	XX	21.06	Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
113	XX	22	Program pembangunan makam pahlawan
113	XX	22.01	Pembangunan taman makam pahlawan
113	XX	23	Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial
113	XX	23.01	Asuransi kesejahteraan sosial (ASKESSOS)
113	XX	23.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
113	XX	23.03	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
113	XX	23.04	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
113	XX	23.05	Buffer Stock dan Penyelenggaraan Penyaluran Bansos
113	XX	24	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
113	XX	24.01	Penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi
113	XX	24.02	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
113	XX	24.03	Pengembangan pusdalops
113	XX	24.04	Penyediaan barang-barang logistik BPBD
113	XX	25	Program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
113	XX	25.01	Pelatihan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana
113	XX	25.02	Inventarisasi kerusakan fisik dan kerugian sosial ekonomi masyarakat pasca bencana
113	XX	25.03	Rekonstruksi/rehabilitasi sosial ekonomi masyarakat korban bencana
113	XX	26	Program Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana
113	XX	26.01	Bulan Peringatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
113	XX	26.02	Pemetaan resiko bencana
113	XX	26.03	Pelatihan penanggulangan dan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (relawan)
113	XX	26.04	Fasilitasi operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan bencana
113	XX	26.05	Fasilitasi rumah sakit/sekolah aman bencana
113	XX	26.06	Bimtek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi
113	XX	26.07	Fasilitasi desa siaga/tangguh bencana
113	XX	26.08	Penyusunan rekon SOP penanggulangan bencana
113	XX	27	Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
113	XX	27.01	Pembinaan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial
113	XX	27.02	Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan
114			Ketenagakerjaan
114	XX	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
114	XX	15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah.
114	XX	15.02	Pembangunan balai latihan kerja
114	XX	15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
114	XX	15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
114	XX	15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
114	XX	15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
114	XX	15.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
114	XX	15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
114	XX	15.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
114	XX	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
114	XX	16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
114	XX	16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
114	XX	16.03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
114	XX	16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
114	XX	16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
114	XX	16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
114	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
114	XX	16.08	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Terlatih dan Terampil
114	XX	16.09	Pelatihan Karyawan yang akan Pensiun
114	XX	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
114	XX	17.01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
114	XX	17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
114	XX	17.03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
114	XX	17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
114	XX	17.05	Peningkatan pengawasan; perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
114	XX	17.06	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
114	XX	17.07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
114	XX	17.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
114	XX	17.09	Pelatihan Tatacara penetapan Upah Minimum bagi Pengupahan Kab/Kota/LKS Tripartit
114	XX	17.10	Bimbingan Teknis Syarat-Syarat Kerja
114	XX	17.11	Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan
114	XX	17.12	Bimtek sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
114	XX	17.13	Pelaksanaan dan Penguatan Fungsi LKSTripartit
114	XX	17.14	Sosialisasi standar pengupahan minimal daerah
114	XX	17.15	Pelaksanaan verifikasi dan pembinaan serikat pekerja / serikat buruh se - Kabupaten Siak
114	XX	17.16	Survey Data Kehidupan layak
114	XX	17.17	Penyusunan dan penerapan sistem pengupahan untuk penetapan upah minimum (UMK) Kab. Siak
114	XX	17.18	Bimbingan Teknis Norma Kerja
115			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
115	XX	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
115	XX	15.01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.04	Pendirian unit penanganan pengaduan
115	XX	15.05	Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
115	XX	15.06	Perencanaan; koordinasi; dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.07	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.09	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.10	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
115	XX	15.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
115	XX	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
115	XX	16.01	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
115	XX	16.02	Memfasilitasi peningkatan kemitraan Investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
115	XX	16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	16.04	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
115	XX	16.05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
115	XX	16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
115	XX	16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
115	XX	16.08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	16.09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	16.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
115	XX	16.11	Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga Batik Siak
115	XX	16.12	Iventarisasi Perkembangan UMKM Kabupaten Siak
115	XX	16.13	Promosi Komoditi Unggulan Daerah
115	XX	16.14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah
115	XX	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
115	XX	17.02	Pengembangan klaster bisnis
115	XX	17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
115	XX	17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	17.07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
115	XX	17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga; industri kecil dan industri menengah
115	XX	17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
115	XX	17.10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
115	XX	17.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
115	XX	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
115	XX	18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
115	XX	18.02	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
115	XX	18.03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
115	XX	18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
115	XX	18.05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
115	XX	18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
115	XX	18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
115	XX	18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
115	XX	18.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
115	XX	18.10	Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Akuntansi Koperasi Sistem Komputerisasi Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi
115	XX	18.11	Pengembangan Desa Koperasi
115	XX	18.12	Pameran Produk Unggulan Koperasi
116			Penanaman Modal
116	XX	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
116	XX	15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
116	XX	15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah
116	XX	15.03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPD)
116	XX	15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
116	XX	15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
116	XX	15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
116	XX	15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
116	XX	15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
116	XX	15.09	Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
116	XX	15.10	Penyelenggaraan pameran investasi
116	XX	15.11	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
116	XX	15.12	Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Luar Negeri
116	XX	15.13	Road Show/Temu Bisnis
116	XX	15.14	Updating Website Pendukung Investasi
116	XX	15.15	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah
116	XX	15.16	Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
116	XX	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
116	XX	16.01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
116	XX	16.02	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
116	XX	16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
116	XX	16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
116	XX	16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
116	XX	16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
116	XX	16.07	Kajian kebijakan penanaman modal
116	XX	16.08	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
116	XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
116	XX	16.10	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif
116	XX	16.11	Penyusunan dan Perbanyak Buku Himpunan Ketentuan Peraturan Penanaman Modal
116	XX	16.12	Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal (Brosur; leaflet; buku petunjuk)
116	XX	16.13	Operasional Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan
116	XX	16.14	Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan (Buku Profil BPMP2T, CD Profil BPMP2T)
116	XX	16.15	Survey Perizinan
116	XX	16.16	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
116	XX	16.17	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundang-undangan
116	XX	16.18	Penyusunan Database PMA/PMDN
116	XX	17	Program penyiapan potensi sumberdaya; sarana dan prasarana daerah
116	XX	17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	
1		2	
117		Kebudayaan	
117 XX	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	
117 XX	15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	
117 XX	15.02	Penatagunaan naskah kuno nusantara	
117 XX	15.03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	
117 XX	15.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	
117 XX	15.05	Pemberian dukungan; penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	
117 XX	15.06	Penggandaan buku muatan lokal budaya melayu	
117 XX	15.07	Dukungan pelaksanaan kegiatan kemah budaya nasional	
117 XX	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
117 XX	16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	
117 XX	16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	
117 XX	16.03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	
117 XX	16.04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	
117 XX	16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air	
117 XX	16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	
117 XX	16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	
117 XX	16.08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	
117 XX	16.09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	
117 XX	16.10	Pengawasan; Monitoring; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	
117 XX	16.11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	
117 XX	16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	
117 XX	16.13	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	
117 XX	16.14	Pengelolaan / Pelindungan Benda-Benda Cagar Budaya	
117 XX	16.15	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum & peninggalan bawah air (Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Bangunan Balai Kerapatan Tinggi Siak)	
117 XX	16.16	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	
117 XX	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
117 XX	17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
117 XX	17.02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	
117 XX	17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	
117 XX	17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	
117 XX	17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	
117 XX	17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	
117 XX	17.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	
117 XX	17.08	Napak Tilas Jelajah Sejarah Bersepeda	
117 XX	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	
117 XX	18.01	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	
117 XX	18.02	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	
117 XX	18.03	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	
117 XX	18.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
117 XX	19	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	
117 XX	19.01	Pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu	
117 XX	19.02	Pembangunan Sarana Prasarana Kebudayaan	
118		Kepemudaan dan Olah Raga	
118 XX	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	
118 XX	15.01	Pendataan potensi kepemudaan	
118 XX	15.02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	
118 XX	15.03	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	
118 XX	15.04	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH	
118 XX	15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	
118 XX	15.06	Penyusunan pedoman komunikasi; informasi; edukasi; dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	
118 XX	15.07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	
118 XX	15.08	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	
118 XX	15.09	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	
118 XX	15.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
118 XX	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	
118 XX	16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	
118 XX	16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	
118 XX	16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	
118 XX	16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	
118 XX	16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	
118 XX	16.06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	
118 XX	16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	
118 XX	16.08	Pameran prestasi hasil karya pemuda	
118 XX	16.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
118 XX	16.10	Pengadaan peralatan kesenian	
118 XX	16.11	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibaraka setiap 17 Agustus	
118 XX	16.12	Pelatihan marchingband Kab. Siak	
118 XX	16.13	Pelatihan orkestra kab. Siak	
118 XX	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
118 XX	17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	
118 XX	17.02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
118	XX	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
118	XX	18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
118	XX	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
118	XX	19.01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
118	XX	19.02	Pengembangan sistem sertifikasi dan standardisasi profesi
118	XX	19.03	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
118	XX	19.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
118	XX	19.05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
118	XX	19.06	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
118	XX	19.07	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
118	XX	19.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
118	XX	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
118	XX	20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
118	XX	20.02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
118	XX	20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
118	XX	20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
118	XX	20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
118	XX	20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
118	XX	20.07	Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat
118	XX	20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
118	XX	20.09	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
118	XX	20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
118	XX	20.11	Pengembangan olahraga rekreasi
118	XX	20.12	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet; pelatih; dan teknisi olahraga
118	XX	20.13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih; peneliti; praktisi; dan teknisi olahraga
118	XX	20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
118	XX	20.15	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
118	XX	20.16	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga
118	XX	20.17	Pembibitan dan pembinaan olahraga Sepak Takraw
118	XX	20.18	Kejuaraan BMX
118	XX	20.19	Penyelenggaraan Event Tour De Siak
118	XX	20.20	Penyelenggaraan Event Sepatu Roda
118	XX	20.21	POPDA Prov. Riau
118	XX	20.22	Kejurda Tingkat Pelajar
118	XX	20.23	Penyelenggaraan POPDA Kab. Siak
118	XX	20.24	Festival permainan rakyat tradisional
118	XX	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
118	XX	21.01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
118	XX	21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
118	XX	21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
118	XX	21.04	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
118	XX	21.05	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
118	XX	21.06	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
118	XX	21.07	Rehab Sedang/Berat Stadion Mini
118	XX	21.08	Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)
119			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
119	XX	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
119	XX	15.01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
119	XX	15.02	Pembangunan pos jaga/ronda
119	XX	15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
119	XX	15.04	Pengendalian kebisingan; dan gangguan dari kegiatan masyarakat
119	XX	15.05	Pengendalian keamanan lingkungan
119	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
119	XX	15.07	Pelatihan Dasar Tenaga Linmas Kabupaten Siak
119	XX	15.08	Lingkungan Tertib Belajar Kabupaten Siak (LTBKS)
119	XX	15.09	Operasionalisasi komunitas intelijen daerah
119	XX	15.10	Penyiapan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
119	XX	15.11	Operasional Tim terpadu gangguan keamanan
119	XX	15.12	Pelatihan Pencegahan di dalam rangka penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban masyarakat
119	XX	15.13	Tim monitoring kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
119	XX	15.14	Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat
119	XX	15.15	Orientasi Manajemen Linmas
119	XX	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
119	XX	16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
119	XX	16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
119	XX	16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
119	XX	16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
119	XX	16.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
119	XX	16.06	Pengawasan Dan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah
119	XX	16.07	Operasional Tim Yustisi Kabupaten Siak
119	XX	16.08	Operasional Sekretariat PPNS Kabupaten Siak
119	XX	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
119	XX	17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	
1		2	
119	XX	17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
119	XX	17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
119	XX	17.04	Pembangunan Mushola Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kab. Siak
119	XX	17.05	Pembangunan Mesjid Raya Kec. Minas
119	XX	17.06	Pembangunan Mesjid Raya Kec. Lubuk Dalam
119	XX	17.07	Pembangunan Mesjid Benteng Hillir
119	XX	17.08	Pemeliharaan Sarana Ibadah di Kabupaten Siak
119	XX	17.09	Sosialisasi empat pilar Kebangsaan
119	XX	17.10	Pelatihan dasar bela negara
119	XX	17.11	Sosialisasi nilai kebangsaan
119	XX	17.12	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Kampung Rempak
119	XX	17.13	Pembangunan / Peningkatan Sarana Ibadah
119	XX	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
119	XX	18.01	Facilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
119	XX	18.02	Seminar; talk show; diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
119	XX	18.03	Pentas seni dan budaya; festival; lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
119	XX	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
119	XX	19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
119	XX	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
119	XX	20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
119	XX	20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
119	XX	20.03	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
119	XX	20.04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
119	XX	20.05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
119	XX	20.06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
119	XX	20.07	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
119	XX	20.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
119	XX	21	Program pendidikan politik masyarakat
119	XX	21.01	Penyuluhan kepada masyarakat
119	XX	21.02	Facilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
119	XX	21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik
119	XX	21.04	Penyusunan data base partai politik
119	XX	21.05	Facilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik
119	XX	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
119	XX	22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
119	XX	22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
119	XX	22.03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
119	XX	22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
120			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
120	XX	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
120	XX	15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah
120	XX	15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
120	XX	15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
120	XX	15.04	Rapat-rapat paripurna
120	XX	15.05	Kegiatan Reses
120	XX	15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
120	XX	15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
120	XX	15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
120	XX	15.09	Pembentukan Desa Adat
120	XX	15.10	Badan Legislasi DPRD Kabupaten Siak
120	XX	15.11	Pelaksanaan Tugas-tugas Keprotokoleran DPRD Kabupaten Siak
120	XX	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
120	XX	16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
120	XX	16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
120	XX	16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
120	XX	16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
120	XX	16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
120	XX	16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
120	XX	16.07	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak
120	XX	16.08	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)
120	XX	16.09	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
120	XX	16.10	Facilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
120	XX	16.11	Facilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
120	XX	16.12	Facilitasi Kerjasama Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Siak
120	XX	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120	XX	17.01	Penyusunan analisa standar belanja
120	XX	17.02	Penyusunan standar satuan harga
120	XX	17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
120	XX	17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
120	XX	17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
120	XX	17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

KODE	URAIAN
1	2
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06	Reklame Udara
4.1.1.04.07	Reklame Apung
4.1.1.04.08	Reklame Suara
4.1.1.04.09	Reklame Film/slide
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN
4.1.1.06	Pajak Parkir
4.1.1.06.01	Pajak Parkir
4.1.1.07	Pajak Air Tanah
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah
4.1.1.08	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.09	Pajak Lingkungan
4.1.1.09.01	Pajak Lingkungan
4.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.10.01	Asbes
4.1.1.10.02	Batu Tulis
4.1.1.10.03	Batu Setengah Permata
4.1.1.10.04	Batu Kapur
4.1.1.10.05	Batu Apung
4.1.1.10.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.12.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.01.11	Retribusi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
4.1.2.01.12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.01.13	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Di hapus)
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

KODE	URAIAN
1	2
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.10	Retribusi Penyebrangan di air
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.11	Retribusi Penyebrangan di air
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Di hapus)
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.2.03.06	Retribusi Izin Peruntukan Tanah
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKJ)
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Pengusahaan Penangkaran Sarung Burung Walet
4.1.2.03.09	Retribusi di Bidang Perdagangan (SIUP/TDG/TDP)
4.1.2.03.10	Retribusi Tenaga Kerja Asing
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah
4.1.3.01.02	BUMD
4.1.3.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4.1.3.02.01	BUMN
4.1.3.03	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.3.03.01	Perusahaan Patungan
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14	Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan
4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan
4.1.4.01.17	Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18	Penjualan hasil sitaan
4.1.4.01.19	Penjualan Hasil Bersih Lelang Aset Daerah
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01	Kerugian Uang

KODE	URAIAN
1	2
4.1.4.04.02	Kerugian Barang
4.1.4.05	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.10	Bidang Pertanian
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Di hapus)
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan (Di hapus)
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum
4.1.4.11.03	Sewa Aset Daerah
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	URAIAN
1	2
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4.1.4.12.03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4.1.4.13.04	Bunga Pengembalian Angsuran Pinjaman Kredit PEK
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.14.1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4.1.4.15	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya
4.1.4.15.01	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan
4.1.4.16	Pendapatan BLUD
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD
4.1.4.17	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4.1.4.17.01	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4.2	Dana Perimbangan
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Di hapus)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pas
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
4.2.2	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
4.2.3	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01	Dana alokasi khusus
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus
4.2.3.01.02	Dana alokasi khusus fisik
4.2.3.01.03	Dana alokasi khusus non fisik
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1	Pendapatan Hibah
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01	Pemerintah
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri

KODE	URAIAN
1	2
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.04.01	Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.2	Dana Darurat
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air (Di hapus)
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Di hapus)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian DAU
4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan
4.3.4.01.03	Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah
4.3.4.01.05	Dana Desa
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Kota
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota
4.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya
4.3.6.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya
4.3.6.01.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

KODE	URAIAN
1	2
5	BELANJA DAERAH
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19	Tunjangan Daerah Terpencil
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian
5.1.1.01.23	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.03.02	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB
5.1.1.04.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Di hapus/kodring tidak dipakai lagi)
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.2	Belanja Bunga
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi

KODE	URAIAN
1	2
5.1.3	Belanja Subsidi
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.4	Belanja Hibah
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat
5.1.4.01.02	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5.1.4.01.03	Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum
5.1.4.01.04	Belanja Hibah Kepada Tentara Manunggal Membangun Desa
5.1.4.01.05	Belanja Hibah Kepada Kepolisian Resor
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.4.02.01	Pemerintah Provinsi
5.1.4.02.02	Pemerintah Kabupaten/Kota
5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah
5.1.4.03.01	Perusahaan Daerah
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Masyarakat
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Siak
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sei Apit
5.1.4.04.03	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Minas
5.1.4.04.04	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kandis
5.1.4.04.05	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Tualang
5.1.4.04.06	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Dayun
5.1.4.04.07	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Bunga Raya
5.1.4.04.08	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Koto Gasib
5.1.4.04.09	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sungai Mandau
5.1.4.04.10	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Lubuk Dalam
5.1.4.04.11	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kerinci Kanan
5.1.4.04.12	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sabak Auh
5.1.4.04.13	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Pusako
5.1.4.04.14	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Mempura
5.1.4.04.15	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.16	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.17	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.18	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.19	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.20	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.21	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.22	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.23	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.24	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.25	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.26	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.27	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.28	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas
5.1.4.04.29	Penghargaan kepada Pokmas - Pokmas yang Berprestasi dalam pelaksanaan Spesific Grant
5.1.4.04.30	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Minas
5.1.4.04.31	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Siak
5.1.4.04.32	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Sungai Apit
5.1.4.04.33	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Tualang
5.1.4.04.34	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Kandis
5.1.4.04.35	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Madrasah Negeri
5.1.4.04.36	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Mempura
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
5.1.4.05.01	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan
5.1.4.05.02	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan
5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan, Budaya, Kesenian dan Olahraga
5.1.4.05.04	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
5.1.4.05.05	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ekonomi dan Sosial

KODE	URAIAN
1	2
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Terencana
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tidak Terencana
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PAN
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDI-P
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKS
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPP
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKB
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDS
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PBB
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPRN
5.1.7.05.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
5.1.7.05.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Buruh
5.1.7.05.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem)
5.1.7.05.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
120	XX	17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
120	XX	17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
120	XX	17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
120	XX	17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
120	XX	17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
120	XX	17.12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
120	XX	17.13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
120	XX	17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
120	XX	17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
120	XX	17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
120	XX	17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah
120	XX	17.18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
120	XX	17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
120	XX	17.20	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan
120	XX	17.21	Pengembangan aplikasi keuangan berbasis simda , asistensi anggaran SKPD, dan kompilasi APBD (SKPKD) berbasis SIMDA_Keu
120	XX	17.22	Penyusunan revisi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Siak
120	XX	17.23	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan pajak dan retribusi daerah)
120	XX	17.24	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan pajak dan retribusi daerah)
120	XX	17.25	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan OP/SP PBB Baru)
120	XX	17.26	Sistem informasi pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
120	XX	17.27	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pekan panutan penarikan undian PBB)
120	XX	17.28	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (verifikasi data OP/SP PBB P2 Kab. Siak)
120	XX	17.29	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pengelolaan data OP/SP PBB P2 Kab. Siak)
120	XX	17.30	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penagihan PBB P2 dan BPHTB Kab. Siak)
120	XX	17.31	Yustisi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah
120	XX	17.32	Penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah
120	XX	17.33	Penyusunan laporan barang milik daerah
120	XX	17.34	Pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang daerah dan hasil pengadaan
120	XX	17.35	Pengamanan aset pemerintah kabupaten siak
120	XX	17.36	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah(perencanaan kebutuhan)
120	XX	17.37	Penyusunan Standar Operasional Prosedur
120	XX	17.38	Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah
120	XX	17.39	Asistensi implementasi sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah
120	XX	17.40	Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
120	XX	17.41	Bimbingan teknis pengelolaan gaji PNSD
120	XX	17.42	Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
120	XX	17.43	Bimbingan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten siak
120	XX	17.44	Bimbingan teknis penyusunan anggaran bagi kasubbag program SKPD
120	XX	17.45	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
120	XX	17.46	Fasilitasi Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan
120	XX	17.47	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah
120	XX	17.48	Sosialisasi Standarisasi Satuan Bahan dan Upah
120	XX	17.49	Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan APBD Kabupaten Siak
120	XX	17.50	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPPA
120	XX	18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kecamatan
120	XX	18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
120	XX	18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
120	XX	18.03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
120	XX	18.04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
120	XX	18.05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
120	XX	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
120	XX	19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
120	XX	19.02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
120	XX	19.03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
120	XX	19.04	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
120	XX	19.05	Kajian Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD)
120	XX	19.06	Monitoring Pelaksanaan APBDesa dan Pengelolaan Aset Desa
120	XX	19.07	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Desa
120	XX	19.08	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
120	XX	19.09	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
120	XX	19.10	Penilaian Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant)
120	XX	19.11	Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant)
120	XX	19.12	Pemantauan Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant)
120	XX	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
120	XX	20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
120	XX	20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
120	XX	20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
120	XX	20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
120	XX	20.05	Inventarisasi temuan pengawasan
120	XX	20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
120	XX	20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
120	XX	20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
120	XX	20.09	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Pemilihan kepala desa)
120	XX	20.10	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Pemilihan perangkat desa lainnya)
120	XX	20.11	Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya
120	XX	20.12	Monitoring BPD Se-Kabupaten Siak

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2	
120	XX	20.13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan
120	XX	20.14	Workshop dalam Rangka Peningkatan Kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah Kabupaten Siak
120	XX	20.15	Penyelesaian Masalah Proses Pengadaan Barang dan Jasa
120	XX	20.16	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah
120	XX	20.17	Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
120	XX	20.18	Pelaksanaan Pengawasan Alokasi Dana Desa dan Kelompok Masyarakat
120	XX	20.19	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
120	XX	20.20	Laporan Pajak-Pajak Pegawai (LP2P)
120	XX	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
120	XX	21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
120	XX	21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
120	XX	22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
120	XX	22.01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
120	XX	22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
120	XX	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
120	XX	23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
120	XX	23.02	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web (Software)
120	XX	24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
120	XX	24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
120	XX	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
120	XX	25.01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
120	XX	25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
120	XX	25.03	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
120	XX	25.04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
120	XX	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
120	XX	26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
120	XX	26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
120	XX	26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
120	XX	26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
120	XX	26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan
120	XX	26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru; lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
120	XX	26.07	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
120	XX	26.08	Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi
120	XX	26.09	Fasilitasi kerjasama pembinaan hukum bagi aparaturngawantah kabupaten siak
120	XX	26.10	Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman/Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD
120	XX	26.11	Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD
120	XX	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
120	XX	27.01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
120	XX	27.02	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
120	XX	27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
120	XX	27.04	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
120	XX	27.05	Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa
120	XX	27.06	Review Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa
120	XX	28	Program Pendidikan Kedinasan
120	XX	28.01	Pendidikan dan pelatihan teknis
120	XX	28.02	pendidikan penjenjangan struktural
120	XX	28.03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
120	XX	28.04	Pembuatan buku juknis/juklak
120	XX	28.05	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
120	XX	28.06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
120	XX	28.07	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
120	XX	28.08	Workshop dan Pembimbingan Administrasi Kepegawaian
120	XX	28.09	Bimtek Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepagawaian
120	XX	29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturng
120	XX	29.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
120	XX	29.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
120	XX	29.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
120	XX	29.04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
120	XX	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
120	XX	30.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
120	XX	30.02	Seleksi penerimaan calon PNS
120	XX	30.03	Penempatan PNS
120	XX	30.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
120	XX	30.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
120	XX	30.06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
120	XX	30.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
120	XX	30.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
120	XX	30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
120	XX	30.10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
120	XX	30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
120	XX	30.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
120	XX	30.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
120	XX	30.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
120	XX	30.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
120	XX	30.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat
120	XX	30.17	Penyelenggaraan HUT KORPRI
120	XX	30.18	Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Propinsi/Nasional
120	XX	30.19	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya
120	XX	30.20	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
120	XX	30.21	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
120	XX	30.22	Analisis Formasi Kebutuhan Pegawai
120	XX	30.23	Pengelolaan Penilaian Kompetensi dan Potensi Pejabat Struktural
120	XX	30.24	Analisis Kepangkatan dan Promosi Jabatan PNS (Pengelolaan Jabatan dan Kepangkatan PNS)
120	XX	30.25	Penataan Sistem Administrasi dan Pelayanan Kepagawaian Kabupaten Siak
120	XX	30.26	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS Masa Purna Bhakti
120	XX	30.27	Pembekalan Pengantar Tugas
120	XX	30.28	Pengelolaan Data Database Kepegawaian
120	XX	30.29	Penerapan Kartu PNS Elektronik di Lingkungan Pemkab Siak
120	XX	30.30	Pengadaan Buku Saku Pegawai
120	XX	30.31	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja dan Praja IPDN
120	XX	31	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan
120	XX	31.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
120	XX	31.02	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan (MTQ kecamatan)
120	XX	31.03	Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)
120	XX	31.04	Penyelenggaraan Siak Bermadah
120	XX	31.05	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak (MTQ Kabupaten Siak)
120	XX	31.06	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB)
120	XX	31.07	Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
120	XX	31.08	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
120	XX	31.09	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
120	XX	31.10	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
120	XX	31.11	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan (MTQ Kelurahan)
120	XX	31.12	Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan
120	XX	31.13	Penyelenggaraan Penanaman Perdana Benih Padi (Turun Bumi)
120	XX	31.14	Penyelenggaraan Petang Megang (Ramadhan)
120	XX	32	Program Optimalisasi Pelayanan Publik
120	XX	32.01	Monitoring Perizinan
120	XX	32.02	Sosialisasi Perizinan
120	XX	32.03	Pemeliharaan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Kantor Camat Siak
120	XX	32.04	Pemeliharaan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kelurahan Perawang
120	XX	32.05	Pemeliharaan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
120	XX	32.06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial
120	XX	32.07	Survey Kepuasan Masyarakat
120	XX	32.08	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis Bagi SKPD Kab. Siak
120	XX	33	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
120	XX	33.01	Pembangunan Asrama Siswa Islamic Centre
120	XX	33.02	Pembangunan Asrama Haji Kab. Siak
120	XX	33.03	Pembangunan SMA Islamic Centre Kab. Siak
120	XX	33.04	Pembangunan sarana penunjang MAN Insan Cendekia Tualang
120	XX	33.05	Pembangunan Perumahan Guru Kawasan Islamic Centre
120	XX	33.06	Pelatihan Guru Mata Pelajaran PDTA
120	XX	33.07	Pelaksanaan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
120	XX	33.08	Pelaksanaan Pekan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
120	XX	33.09	Peningkatan Sarana dan Prasarana MDA/TPA dan Pondok Pesantren
120	XX	33.10	Pembangunan PDTA, MTS, MA dan Ponpes
120	XX	33.11	Rehab PDTA, MTS, MA dan Ponpes
120	XX	33.12	Pendidikan Gratis MI
120	XX	33.13	Penyediaan Sarana Prasarana MTQ
120	XX	33.14	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Agung Sultan Syarif Hasyim
120	XX	34	program Penataan Organisasi Perangkat Daerah
120	XX	34.01	Penyusunan Pedoman Evaluasi Perangkat Daerah
120	XX	34.02	Pemetaan Urusan Dalam Rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah
120	XX	34.03	Kajian Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien
120	XX	34.04	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
120	XX	34.05	Fasilitasi Penetapan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
120	XX	34.06	Fasilitasi Pembentukan UPTD/UPTB
120	XX	35	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD
120	XX	35.01	Identifikasi dan penyusunan profil BUMD/Perusahaan Daerah
120	XX	35.02	Workshop penyusunan SOP BUMD
120	XX	35.03	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah
120	XX	35.04	Diagnostik assesment penerapan GCG
120	XX	35.05	Penyusunan Code of CG dan Code of Conduct (Pedoman Kode Etik dan Perilaku Perusahaan)

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
120	XX	36	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama
120	XX	36.01	Bantuan insentif bagi Da' I dan Khatib se - Kabupaten Siak
120	XX	36.02	Pelatihan penyelenggaraan Jenazah
120	XX	36.03	Pelatihan Peningkatan Mutu Imam, Khatib, dan Bilal
120	XX	36.04	Pengiriman Jemaah Calon Haji dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Siak di Embarkasi
120	XX	36.05	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam
120	XX	36.06	Pelaksanaan Ibadah Haji & Umroh oleh Pemerintah Kabupaten Siak
120	XX	36.07	Peningkatan Mutu Dal/Dalah se-Kabupaten Siak
120	XX	36.08	Pelatihan Pengelolaan Tanah Wakaf
120	XX	36.09	Safari Jum`at Pemerintah Kabupaten Siak
120	XX	36.10	Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak
120	XX	36.11	Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) Kabupaten Siak
120	XX	37	Program Jaminan Sosial
120	XX	37.01	Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
120	XX	37.02	Koordinasi dan Evaluasi Raskin
120	XX	38	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur
120	XX	38.01	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik
120	XX	38.02	Evaluasi Penataan OPD dan UPTD, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas SKPD dan UPTD
120	XX	38.03	Evaluasi kinerja mandiri penyelenggaraan pemerintah daerah
120	XX	39	Program Sosialisasi Hukum Daerah
120	XX	39.01	Sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Siak
120	XX	39.02	Penyuluhan hukum terpadu tentang implementasi peraturan perundang-undangan
120	XX	39.03	Diseminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Siak
120	XX	39.04	Lomba Kadarkum
120	XX	39.05	Sosialisasi Juknis Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat
120	XX	40	Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
120	XX	40.01	Evaluasi dan Pelaporan tentang Implementasi Produk Hukum Daerah
120	XX	40.02	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang Implikasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
120	XX	41	Program Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
120	XX	41.01	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada
120	XX	42	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama
120	XX	42.01	Manasik Haji Kabupaten Siak
120	XX	42.02	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak
120	XX	42.03	Pegiriman Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Siak pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau
120	XX	42.04	Pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK)
120	XX	42.05	Pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Tingkat Propinsi Riau
120	XX	42.06	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten Siak
120	XX	42.07	Pelatihan Pengurus Remaja Masjid Se Kabupaten Siak
120	XX	42.08	Pelatihan Manajemen Pengurus Masjid Se Kabupaten Siak
120	XX	42.09	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak
120	XX	42.10	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau
120	XX	43	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
120	XX	43.01	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Produksi di Daerah
120	XX	43.02	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal
120	XX	43.03	Koordinasi dan Pemantauan Pemanfaatan bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
120	XX	44	Program Pembinaan Perekonomian Rakyat
120	XX	44.01	Workshop sumber daya pengelolaan koperasi / UMKM
120	XX	44.02	Pelatihan pengembangan usaha kerakyatan dan lain-lain
120	XX	45	Program Batas Wilayah Pemerintahan
120	XX	45.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota
120	XX	46	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
120	XX	46.01	Fasilitas penyelenggaraan pembinaan pemerintah (Bed Nama)
121			Ketahanan Pangan
121	XX	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
121	XX	15.01	Penanganan daerah rawan pangan
121	XX	15.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan
121	XX	15.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
121	XX	15.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
121	XX	15.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
121	XX	15.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
121	XX	15.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
121	XX	15.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
121	XX	15.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
121	XX	15.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
121	XX	15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
121	XX	15.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
121	XX	15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
121	XX	15.14	Pengembangan desa mandiri pangan
121	XX	15.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija
121	XX	15.16	Pengembangan diversifikasi tanaman
121	XX	15.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
121	XX	15.18	Pengembangan lumbung pangan desa
121	XX	15.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
121	XX	15.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan
121	XX	15.21	Pengembangan sistem informasi pasar
121	XX	15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
121	XX	15.23	Koordinasi kebijakan perberasan
121	XX	15.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
121	XX	15.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
121	XX	15.26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
121	XX	15.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
121	XX	15.28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
121	XX	15.29	Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian
121	XX	15.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif
121	XX	15.31	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
121	XX	15.32	Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang
121	XX	15.33	Penyuluhan Ketahanan Pangan Melalui Radio, TV dan Surat Kabar
121	XX	15.34	Pameran Ketahanan Pangan Dan Lomba Cipta Menu
121	XX	15.35	HKS-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
121	XX	15.36	Penerapan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian
121	XX	15.37	Pendataan dan Pemetaan Produksi dan Kebutuhan Pangan
121	XX	15.38	Pembinaan dan Pendampingan Cadangan Pangan Daerah
121	XX	15.39	Rapat Teknis dan sinkronisasi Program/Kegiatan Ketahanan Pangan
121	XX	15.40	Operasional Dewan Ketahanan Pangan
121	XX	15.41	Penyusunan Rancangan Implementasi Program Pembangunan Ketahanan Pangan DKP
121	XX	15.42	Penyusunan Rancangan Implementasi Program Pembangunan Ketahanan Pangan UPTB/BPK
121	XX	15.43	Penanggulangan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
121	XX	15.44	Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
121	XX	15.45	Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Program Penyuluhan
121	XX	15.46	Penyusunan Program Penyuluhan
121	XX	15.47	Pendampingan KRPL
121	XX	16	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
121	XX	16.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
121	XX	16.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
121	XX	16.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
121	XX	16.04	Penilaian UPTB, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi
121	XX	16.05	Studi Banding/Magang Petani dan Penyuluh
121	XX	16.06	Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Penyuluh
121	XX	17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
121	XX	17.01	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat; Penyusunan Silabi; Penyusunan Modul; Penyusunan Pedoman Diklat)
121	XX	18	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
121	XX	18.01	Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah
121	XX	18.02	Inventarisasi dan klarifikasi serta pengembangan kelembagaan perkebunan rakyat
121	XX	18.03	Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan besar swasta
121	XX	18.04	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat
121	XX	19	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
121	XX	19.01	Pengembangan perbenihan/perbibitan
121	XX	19.02	Revitalisasi lahan perkebunan
121	XX	19.03	Penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan
121	XX	19.04	Pembinaan dan peningkatan mutu hasil perkebunan
121	XX	19.05	Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil kehutanan dan perkebunan
121	XX	19.06	Pembangunan kebun induk tanaman perkebunan
122	XX		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
122	XX	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
122	XX	15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
122	XX	15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
122	XX	15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
122	XX	15.04	Lomba Pos Pelayanan Teknologi
122	XX	15.05	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
122	XX	15.06	Pembinaan Program Pemberdayaan Desa (PPD)
122	XX	15.07	Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
122	XX	15.08	Gelar Teknologi Tepat Guna
122	XX	15.09	Desa Binaan Keluarga Sakinah
122	XX	15.10	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
122	XX	15.11	Monitoring Rumah Layak Huni dan Infrastruktur Pendukung
122	XX	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
122	XX	16.01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
122	XX	16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
122	XX	16.03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
122	XX	16.04	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	
1		2	
122	XX	16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
122	XX	16.06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
122	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
122	XX	16.08	Perlombaan desa dan kelurahan
122	XX	16.09	Perlombaan Desa Binaan Program P2WKSS
122	XX	16.10	Monitoring Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan
122	XX	16.11	Pembinaan Pasar Desa
122	XX	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
122	XX	17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
122	XX	17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
122	XX	17.03	Pemberian stimulan pembangunan desa
122	XX	17.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
122	XX	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
122	XX	18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
122	XX	18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
122	XX	18.04	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
122	XX	18.05	Bimbingan teknis pembekalan bagi aparatur pemerintahan desa tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
122	XX	18.06	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes
122	XX	18.07	Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa
122	XX	18.08	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ
122	XX	18.09	Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang BPD
122	XX	18.10	Pelatihan Pengelolaan Potensi Desa
122	XX	18.11	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Desa
122	XX	18.12	Bimtek Sarjana Pendamping Keuangan Desa
122	XX	18.13	Pelatihan Manajemen Posyantek
122	XX	18.14	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat P3MD Se-Kabupaten Siak
122	XX	18.15	Temu Karya LPM Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Siak
122	XX	18.16	Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perdesaan
122	XX	18.17	Pelatihan Pengelola UED-SP
122	XX	18.18	Pelatihan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Terpadu (P3MD)
122	XX	18.19	Temu Wicara
122	XX	18.20	Sosialisasi Undang-Undang Desa
122	XX	18.21	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
122	XX	18.22	Peningkatan Peran Posyandu Dalam Pelayanan Sosial Masyarakat
122	XX	18.23	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
122	XX	18.24	Pelatihan Karang Taruna
122	XX	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
122	XX	19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
123			Statistik
123	XX	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
123	XX	15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
123	XX	15.02	Pengolahan; updating dan analisis data dan statistik daerah
123	XX	15.03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
123	XX	15.04	Pengolahan; updating dan analisis data PDRB
124			Kearsipan
124	XX	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
124	XX	15.01	Pembangunan data base informasi kearsipan
124	XX	15.02	Pengumpulan data
124	XX	15.03	Pengklasifikasian data
124	XX	15.04	Penyusunan sistem katalog data
124	XX	15.05	Pengadaan sarana penyimpanan
124	XX	15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan
124	XX	15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
124	XX	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
124	XX	16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
124	XX	16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
124	XX	16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
124	XX	16.04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
124	XX	16.05	Bimbingan Teknis dan Diklat Kearsipan
124	XX	16.06	Akuisisi Arsip
124	XX	16.07	Pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
124	XX	16.08	Restorasi Arsip/Dokumen Daerah
124	XX	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
124	XX	17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
124	XX	17.02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
124	XX	17.03	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
124	XX	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
124	XX	18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
124	XX	18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
124	XX	18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
125			Komunikasi dan Informatika

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
125	XX	15	Program Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa
125	XX	15.01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
125	XX	15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
125	XX	15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
125	XX	15.04	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
125	XX	15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi
125	XX	15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
125	XX	15.07	Pengembangan Jaringan Internet di Kecamatan
125	XX	15.08	Pengembangan Area Hotspot dan Jaringan Internet Sekolah Kecamatan
125	XX	16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
125	XX	16.01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
125	XX	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
125	XX	17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
125	XX	17.02	Pelatihan komunikasi efektif
125	XX	18	Program kerjasama informasi dengan mas media
125	XX	18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
125	XX	18.02	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
125	XX	18.03	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
125	XX	18.04	Peliputan Kegiatan DPRD Kabupaten Siak
125	XX	18.05	Kerja sama dan Sewa Halaman Melalui Media dengan Pemerintah Daerah Kabuapten Siak
125	XX	18.06	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak
125	XX	18.07	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik
125	XX	18.08	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid
125	XX	18.09	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah
125	XX	18.10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Internet/Media Online
125	XX	19	Program pengembangan data dan statistik.
125	XX	19.01	Updating Data Sumber Daya Alam; Ekonomi; Keuangan dan Investasi
126	XX	15	Perpustakaan
126	XX	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
126	XX	15.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
126	XX	15.02	Implementasi strategi peningkatan dan pengembangan minat dan budaya baca
126	XX	15.03	Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
126	XX	15.04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
126	XX	15.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
126	XX	15.06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
126	XX	15.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
126	XX	15.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
126	XX	15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
126	XX	15.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
126	XX	15.11	Penerapan dan Pendampingan Rekomendasi Kebijakan Lokal
126	XX	15.12	Perencanaan Cetak SOP Layanan dan Penyusunan Program budaya Baca
126	XX	15.13	Penyediaan Bahan Pustaka, Perpustakaan Keliling
126	XX	15.14	Penyelenggaraan Perlombaan/Perayaan dan Festival
126	XX	15.15	Identifikasi Pemetaan Minat Budaya Baca
126	XX	15.16	Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Perpustakaan
126	XX	15.17	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perpustakaan
126	XX	15.18	Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan
126	XX	15.19	Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Sekolah
126	XX	15.20	Penyelenggaraan Koleksi Perpustakaan/Dokumen Arsip
126	XX	15.21	Penerapan dan Pendampingan Rekomendasi Kebijakan Lokal
126	XX	15.22	Pembuatan Profil Perpustakaan di Kabupaten
126	XX	16	Program evaluasi , pelatihan dan penyelenggaraan bimbingan teknis
126	XX	16.01	Pengembangan pustakawan, koleksi perpustakaan pengolahan, preservasi dan konservasi bahan pustaka
126	XX	17	Program pengembangan manajemen pelayanan perpustakaan
126	XX	17.01	Pembinaan dan stimulasi bagi pengunjung perpustakaan
126	XX	17.02	Pembinaan dan kerjasama mitra perpustakaan
126	XX	17.03	Pembuatan standar pelayanan minimum bagi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa
126	XX	17.04	Manajemen Layanan Digitalisasi
126	XX	18	Program pengembangan kapasitas tenaga pustakawan dan arsiparis
126	XX	18.01	Pengiriman pustakawan dan arsiparis mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan lain sebagainya
126	XX	18.02	Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepustakaan
126	XX	18.03	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
126	XX	19	Program pembangunan dan pengembangan pustaka kecamatan dan desa
126	XX	19.01	Pembuatan design engineering detail (DED) perpustakaan desa
126	XX	20	Program pengadaan bahan bacaan dan sarana pendukung perpustakaan
126	XX	20.01	Penyediaan bahan pustaka, perpustakaan desa/masyarakat/tempat ibadah
126	XX	20.02	Penyediaan Bahan Pustaka dan Sarana Pendukung Perpustakaan Desa/Masyarakat/Tempat Ibadah

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
126	XX	21	Program pengembangan pustaka elektronik
126	XX	21.01	Pembuatan e-library
126	XX	22	Program pengembangan kemitraan pustaka sekolah
126	XX	22.01	Pembinaan dan kerjasama mitra perpustakaan sekolah
2			Urusan Pilihan
201			Pertanian
201	XX	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
201	XX	15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
201	XX	15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
201	XX	15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani
201	XX	15.04	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani
201	XX	15.05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
201	XX	15.06	Pekan Daerah (PEDA) KTNA
201	XX	15.07	Pekan Nasional (PENAS) KTNA
201	XX	15.08	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pelaku Agribisnis Tanaman Holtikultura
201	XX	15.09	Lomba Asah Terampil Kelompok Tani
201	XX	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
201	XX	16.01	Penanganan daerah rawan pangan
201	XX	16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan
201	XX	16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
201	XX	16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
201	XX	16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
201	XX	16.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
201	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
201	XX	16.08	Monitoring; evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
201	XX	16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
201	XX	16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
201	XX	16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
201	XX	16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
201	XX	16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah
201	XX	16.14	Pengembangan desa mandiri pangan
201	XX	16.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija
201	XX	16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman
201	XX	16.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
201	XX	16.18	Pengembangan lumbung pangan desa
201	XX	16.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
201	XX	16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan
201	XX	16.21	Pengembangan sistem informasi pasar
201	XX	16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
201	XX	16.23	Koordinasi kebijakan perberasan
201	XX	16.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
201	XX	16.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
201	XX	16.26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
201	XX	16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
201	XX	16.28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
201	XX	16.29	Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian
201	XX	16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif
201	XX	16.31	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
201	XX	17.01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
201	XX	17.02	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer.
201	XX	17.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
201	XX	17.04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
201	XX	17.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
201	XX	17.06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
201	XX	17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.
201	XX	17.08	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
201	XX	17.09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
201	XX	17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
201	XX	17.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
201	XX	17.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
201	XX	17.13	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
201	XX	18.01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
201	XX	18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
201	XX	18.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
201	XX	18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
201	XX	18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
201	XX	18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
201	XX	18.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
201	XX	19.01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
201	XX	19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
201	XX	19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
201	XX	19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
201	XX	19.05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
201	XX	19.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
201	XX	20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
201	XX	20.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
201	XX	20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
201	XX	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
201	XX	21.01	Pendataan masalah peternakan
201	XX	21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
201	XX	21.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
201	XX	21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
201	XX	21.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	21.06	Sosialisasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
201	XX	21.07	Surveillance penyakit hewan menular strategis (PHMS)
201	XX	21.08	Pengendalian populasi ternak terjangkit zoonosis
201	XX	21.09	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit flu burung
201	XX	21.10	Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak
201	XX	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan
201	XX	22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
201	XX	22.02	Pembibitan dan perawatan ternak
201	XX	22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
201	XX	22.04	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
201	XX	22.05	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
201	XX	22.06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
201	XX	22.07	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
201	XX	22.08	Pengembangan agribisnis peternakan
201	XX	22.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	22.10	Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan
201	XX	22.11	Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman
201	XX	22.12	Pengembangan Indukan Ternak
201	XX	22.13	Peningkatan sarana dan prasarana di Demplot Jatibaru
201	XX	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
201	XX	23.01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
201	XX	23.02	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.
201	XX	23.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
201	XX	23.04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan
201	XX	23.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
201	XX	23.06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan
201	XX	23.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
201	XX	23.08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
201	XX	23.09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
201	XX	23.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
201	XX	23.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
201	XX	23.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
201	XX	23.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
201	XX	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
201	XX	24.01	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
201	XX	24.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
201	XX	24.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
201	XX	24.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
201	XX	24.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
201	XX	24.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
201	XX	24.07	Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Hewan
201	XX	25	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
201	XX	25.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi
201	XX	25.02	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija
201	XX	25.03	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung
201	XX	25.04	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai
201	XX	25.05	Perluasan Areal Sawah
201	XX	25.06	Pengembangan Bibit/benih Tanaman Pangan
201	XX	25.07	Peningkatan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan
201	XX	25.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pertanian
201	XX	25.09	Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi
201	XX	25.10	Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
201	XX	25.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
201	XX	25.12	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
201	XX	26	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
201	XX	26.01	Perluasaan Areal Hortikultura
201	XX	26.02	Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran
201	XX	26.03	Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan
201	XX	26.04	Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Obat dan Tanaman Hias
201	XX	26.05	Pengembangan Benih/Bibit Hortikultura

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
201	XX	27	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian
201	XX	27.01	Promosi Hasil Produksi Pertanian
201	XX	27.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil produk Pertanian
201	XX	27.03	Workshop Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi
201	XX	27.04	Pembinaan Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi
201	XX	27.05	Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian
201	XX	28	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
201	XX	28.01	Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa
201	XX	28.02	Pengadaan Alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian
201	XX	28.03	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
201	XX	28.04	Pengadaan alat dan mesin pasca panen pertanian
201	XX	28.05	Penyediaan sarana produksi pertanian
202			Kehutanan
202	XX	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
202	XX	15.01	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
202	XX	15.02	Pengembangan hutan tanaman
202	XX	15.03	Pengembangan hasil hutan non-kayu
202	XX	15.04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
202	XX	15.05	Optimalisasi PNBP
202	XX	15.06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
202	XX	15.07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
202	XX	15.08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
202	XX	15.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
202	XX	15.10	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan
202	XX	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan
202	XX	16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
202	XX	16.02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
202	XX	16.03	Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata
202	XX	16.04	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota, Hutan Wisata dan Taman Kota
202	XX	16.05	Pembinaan; pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
202	XX	16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
202	XX	16.07	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
202	XX	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
202	XX	17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
202	XX	17.02	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
202	XX	17.03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
202	XX	17.04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
202	XX	17.05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
202	XX	17.06	Operasi pengamanan hutan lintas daerah
202	XX	17.07	Penanggulangan gangguan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang
202	XX	17.08	Penyelamatan Kawasan Lindung Sempadan Sungai
202	XX	17.09	Pemeliharaan Tanaman RHL
202	XX	17.10	Penghijauan dan Pembuatan Jalur Hijau
202	XX	17.11	Penanaman serentak gerakan menanam pohon nasional
202	XX	17.12	Rehabilitasi Kawasan dan Hutan Mangrove
202	XX	18	Program pemanfaatan kawasan hutan industri
202	XX	18.01	Pertanian tanaman palawija; padi gogorancah
202	XX	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
202	XX	19.01	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
202	XX	19.02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
202	XX	19.03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
202	XX	19.04	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
202	XX	19.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
202	XX	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan
202	XX	20.01	Pengembangan hutan masyarakat adat
202	XX	20.02	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
202	XX	20.03	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan survey lapangan
202	XX	20.04	Inventarisasi dan Klarifikasi Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Pemetaan Kawasan Hutan dan Lahan)
202	XX	20.05	Inventarisasi dan Klarifikasi Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
202	XX	20.06	Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk fasilitas umum
202	XX	20.07	Pemantapan status kawasan hutan
202	XX	20.08	Pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan untuk fasilitas umum
202	XX	20.09	Fasilitasi kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
202	XX	20.10	Penetapan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
202	XX	20.11	Monitoring, Pendataan, dan Evaluasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan
202	XX	20.12	Penyusunan Rancangan Teknik Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
203			Energi dan Sumberdaya Mineral
203	XX	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
203	XX	15.01	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
203	XX	15.02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
203	XX	15.03	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

KODE	URAIAN
1	2
	terselesaikan
6.2.5.01.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga Lainnya
6.2.6	Pengembalian Penerimaan Daerah
6.2.6.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD
6.2.6.01.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD
6.2.6.01.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dana PAD Lainnya
6.2.6.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Perimbangan
6.2.6.02.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAK
6.2.6.02.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAU
6.2.6.03	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.2.6.03.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Penyesuaian
6.2.6.03.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah Lainnya
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

h BUPATI SIAK, P
SYAMSUAR f n

**DAFTAR KODE AKUN NERACA
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE	URAIAN
1	2
1	ASET
1.1	ASET LANCAR
1.1.1	Kas
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah
1.1.1.01.01	Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.01.02	Bagi Hasil/SILPA
1.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.1.1.01.05	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.1.1.01.06	Dana Alokasi Umum
1.1.1.01.07	Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.1.1.01.08	Pendapatan Hibah
1.1.1.01.09	Dana Darurat
1.1.1.01.10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.1.1.01.11	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.1.1.01.12	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.1.1.01.13	DAK Bid. Infrastruktur
1.1.1.01.14	DAK Bid. Pertanian
1.1.1.01.15	DAK Bid. Kesehatan
1.1.1.01.16	DAK Bid. Pendidikan
1.1.1.01.17	DAK Bid. Kelautan dan Perikanan
1.1.1.01.18	DAK Bid. Prasarana Pemda
1.1.1.01.19	DAK Bid. Lingkungan Hidup
1.1.1.01.20	Kas Umum Daerah
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.1.03.01	Kas Pada Bendahara
1.1.2	Investasi Jangka Pendek
1.1.2.01	Investasi dalam Saham
1.1.2.01.01	Investasi dalam Saham
1.1.2.02	Investasi dalam Obligasi
1.1.2.02.01	Investasi dalam Obligasi
1.1.3	Piutang
1.1.3.01	Piutang Pajak
1.1.3.01.01	Piutang Pajak
1.1.3.02	Piutang Retribusi
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi
1.1.3.03	Piutang Dana Bagi Hasil
1.1.3.03.01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak
1.1.3.03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1.1.3.04	Piutang Dana Alokasi Umum

KODE	URAIAN
1	2
1.1.3.04.01	Piutang Dana Alokasi Umum
1.1.3.05	Piutang Dana Alokasi Khusus
1.1.3.05.01	Piutang Dana Alokasi Khusus
1.1.4	Piutang Lain-lain
1.1.4.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
1.1.4.01.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
1.1.4.01.02	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
1.1.4.02	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah
1.1.4.02.01	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah
1.1.4.03	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
1.1.4.03.01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
1.1.4.04	Piutang Dividen
1.1.4.04.01	Piutang Dividen
1.1.4.05	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
1.1.4.05.01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
1.1.4.06	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1.1.4.06.01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1.1.5	Persediaan
1.1.5.01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.5.02	Persediaan Alat Listrik
1.1.5.02.01	Persediaan Alat Tulis Listrik
1.1.5.03	Persediaan Material/Bahan
1.1.5.03.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan
1.1.5.03.02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
1.1.5.03.03	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
1.1.5.03.04	Persediaan Bibit Ternak
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan
1.1.5.03.06	Persediaan Bahan Kimia
1.1.5.04	Persediaan Benda Pos
1.1.5.04.01	Persediaan Perangko
1.1.5.04.02	Persediaan Materai
1.1.5.04.03	Persediaan Kertas Segel
1.1.5.05	Persediaan Bahan Bakar
1.1.5.05.01	Persediaan Bahan Bakar minyak
1.1.5.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1.1.5.06.01	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1	Investasi Non Permanen
1.2.1.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
1.2.1.01.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
1.2.1.02	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
1.2.1.02.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
1.2.1.03	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1.2.1.03.01	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

KODE	URAIAN
1	2
1.2.1.04	Investasi dalam Surat Utang Negara
1.2.1.04.01	Investasi dalam Surat Utang Negara
1.2.1.05	Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.1.05.01	Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.2	Investasi Permanen
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1.2.2.02	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
1.2.2.02.01	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
1.2.2.03	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
1.2.2.03.01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
1.2.2.04	Investasi Permanen Lainnya
1.2.2.04.01	Investasi Permanen Lainnya
1.3	ASET TETAP
1.3.1	Tanah
1.3.1.01	Tanah Kantor
1.3.1.01.01	Tanah Kantor
1.3.1.02	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
1.3.1.02.01	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
1.3.1.03	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
1.3.1.03.01	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
1.3.1.04	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
1.3.1.04.01	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
1.3.1.05	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak
1.3.1.05.01	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak
1.3.1.06	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
1.3.1.06.01	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
1.3.1.07	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
1.3.1.07.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
1.3.1.08	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
1.3.1.08.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
1.3.1.09	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
1.3.1.09.01	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa
1.3.1.09.02	Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus
1.3.1.10	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus
1.3.1.10.01	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan
1.3.1.10.02	Tanah Sarana Pendidikan Kursus
1.3.1.11	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
1.3.1.11.01	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
1.3.1.12	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
1.3.1.12.01	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
1.3.1.13	Tanah Sarana Umum Terminal
1.3.1.13.01	Tanah Sarana Umum Terminal

KODE	URAIAN
1	2
1.3.1.14	Tanah Sarana Umum Dermaga
1.3.1.14.01	Tanah Sarana Umum Dermaga
1.3.1.15	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
1.3.1.15.01	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
1.3.1.16	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
1.3.1.16.01	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
1.3.1.17	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
1.3.1.17.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
1.3.1.18	Tanah Sarana Umum Pasar
1.3.1.18.01	Tanah Sarana Umum Pasar
1.3.1.19	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
1.3.1.19.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
1.3.1.20	Tanah Sarana Umum Taman
1.3.1.20.01	Tanah Sarana Umum Taman
1.3.1.21	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
1.3.1.21.01	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
1.3.1.22	Tanah Sarana Umum Ibadah
1.3.1.22.01	Tanah Sarana Umum Ibadah
1.3.1.23	Tanah Sarana Stadion Olahraga
1.3.1.23.01	Tanah Sarana Umum Olahraga
1.3.1.24	Tanah Perumahan
1.3.1.24.01	Tanah Perumahan
1.3.1.25	Tanah Pertanian
1.3.1.25.01	Tanah Pertanian
1.3.1.26	Tanah Perkebunan
1.3.1.26.01	Tanah Perkebunan
1.3.1.27	Tanah Perikanan
1.3.1.27.01	Tanah Perikanan
1.3.1.28	Tanah Peternakan
1.3.1.28.01	Tanah Peternakan
1.3.1.29	Tanah Perkampungan
1.3.1.29.01	Tanah Perkampungan
1.3.1.30	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
1.3.1.30.01	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
1.3.2	Peralatan dan Mesin
1.3.2.01	Alat-alat Berat
1.3.2.01.01	Traktor
1.3.2.01.02	Bulldozer
1.3.2.01.03	Stoom Wals
1.3.2.01.04	Eskavator
1.3.2.01.05	Dump Truk
1.3.2.01.06	Crane
1.3.2.01.07	Kendaraan penyapu jalan
1.3.2.01.08	Mesin pengolah semen
1.3.2.01.09	Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)

KODE	URAIAN
1	2
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.2.02.01	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan
1.3.2.02.02	Alat-alat angkutan darat bermotor jeep
1.3.2.02.03	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
1.3.2.02.04	Alat-alat angkutan darat bermotor bus
1.3.2.02.05	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
1.3.2.02.06	Alat-alat angkutan darat bermotor truck
1.3.2.02.07	Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
1.3.2.02.08	Alat-alat angkutan darat bermotor boks
1.3.2.02.09	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up
1.3.2.02.10	Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
1.3.2.02.11	Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
1.3.2.02.12	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
1.3.2.02.13	Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
1.3.2.02.14	Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
1.3.2.03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
1.3.2.03.01	Gerobak
1.3.2.03.02	Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
1.3.2.03.03	Becak
1.3.2.03.04	Sepeda
1.3.2.03.05	Karavan
1.3.2.04	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
1.3.2.04.01	Kapal motor
1.3.2.04.02	Kapal feri
1.3.2.04.03	Speed boat
1.3.2.04.04	Motor boat/motor tempel
1.3.2.04.05	Hydro foil
1.3.2.04.06	Jet foil
1.3.2.04.07	Kapal tug boat
1.3.2.04.08	Kapal tanker
1.3.2.04.09	Kapal kargo
1.3.2.05	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
1.3.2.05.01	Perahu layar
1.3.2.05.02	Perahu sampan
1.3.2.05.03	Perahu tongkang
1.3.2.05.04	Perahu karet
1.3.2.05.05	Perahu rakit
1.3.2.05.06	Perahu sekoci
1.3.2.06	Alat-alat Angkutan Udara
1.3.2.06.01	Pesawat kargo
1.3.2.06.02	Pesawat penumpang
1.3.2.06.03	Pesawat helikopter
1.3.2.06.04	Pesawat pemadam kebakaran
1.3.2.06.05	Pesawat capung
1.3.2.06.06	Pesawat terbang amphi
1.3.2.06.07	Pesawat terbang layang
1.3.2.07	Alat-alat Bengkel
1.3.2.07.01	Mesin las
1.3.2.07.02	Mesin bubut
1.3.2.07.03	Mesin dongkrak
1.3.2.07.04	Mesin kompresor
1.3.2.08	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
1.3.2.08.01	Penggiling hasil pertanian
1.3.2.08.02	Alat pengering gabah
1.3.2.08.03	Mesin bajak
1.3.2.08.04	Alat penetas
1.3.2.09	Peralatan Kantor
1.3.2.09.01	Mesin tik

KODE	URAIAN
1	2
1.3.2.09.02	Mesin hitung
1.3.2.09.03	Mesin stensil
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy
1.3.2.09.05	Mesin cetak
1.3.2.09.06	Mesin jilid
1.3.2.09.07	Mesin potong kertas
1.3.2.09.08	Mesin penghancur kertas
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik
1.3.2.09.10	Papan visual elektronik
1.3.2.09.11	Tabung pemadam kebakaran
1.3.2.10	Perlengkapan Kantor
1.3.2.10.01	Meja gambar
1.3.2.10.02	Almari
1.3.2.10.03	Brankas
1.3.2.10.04	Filling kabinet
1.3.2.10.05	White board
1.3.2.10.06	Penunjuk waktu
1.3.2.11	Komputer
1.3.2.11.01	Komputer mainframe/server
1.3.2.11.02	Komputer/PC
1.3.2.11.03	Komputer note book
1.3.2.11.04	Printer
1.3.2.11.05	Scanner
1.3.2.11.06	Monitor/display
1.3.2.11.07	CPU
1.3.2.11.08	UPS/Stabilizer
1.3.2.11.09	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
1.3.2.11.10	Peralatan jaringan komputer
1.3.2.12	Meubelair
1.3.2.12.01	Meja kerja
1.3.2.12.02	Meja rapat
1.3.2.12.03	Meja makan
1.3.2.12.04	Kursi kerja
1.3.2.12.05	Kursi rapat
1.3.2.12.06	Kursi makan
1.3.2.12.07	Tempat tidur
1.3.2.12.08	Sofa
1.3.2.12.09	Rak buku/tv/kembang
1.3.2.13	Peralatan Dapur
1.3.2.13.01	Tabung gas
1.3.2.13.02	Kompas gas
1.3.2.13.03	Lemari makan
1.3.2.13.04	Dispenser
1.3.2.13.05	Kulkas
1.3.2.13.06	Rak piring
1.3.2.13.07	Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
1.3.2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.3.2.14.01	Lampu hias
1.3.2.14.02	Jam dinding/meja
1.3.2.15	Alat-alat Studio
1.3.2.15.01	Kamera
1.3.2.15.02	Handycam
1.3.2.15.03	Proyektor
1.3.2.16	Alat-alat Komunikasi
1.3.2.16.01	Telepon
1.3.2.16.02	Faximili
1.3.2.16.03	Radio ssb
1.3.2.16.04	Radio HF/FM (handy talkie)

KODE	URAIAN
1	2
1.3.2.16.05	Radio VHF
1.3.2.16.06	Radio UHF
1.3.2.16.07	Alat sandi
1.3.2.17	Alat-alat Ukur
1.3.2.17.01	Timbangan
1.3.2.17.02	Teodolite
1.3.2.17.03	Alat uji emisi
1.3.2.17.04	Alat GPS
1.3.2.17.05	Kompas/peralatan navigasi
1.3.2.17.06	Bejana ukur
1.3.2.17.07	Barometer
1.3.2.17.08	Seismograph
1.3.2.17.09	Ultrasonograph
1.3.2.18	Alat-alat Kedokteran
1.3.2.18.01	Alat-alat kedokteran umum
1.3.2.18.02	Alat-alat kedokteran gigi
1.3.2.18.03	Alat-alat kedokteran tht
1.3.2.18.04	Alat-alat kedokteran mata
1.3.2.18.05	Alat-alat kedokteran bedah
1.3.2.18.06	Alat-alat kedokteran anak
1.3.2.18.07	Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
1.3.2.18.08	Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
1.3.2.18.09	Alat-alat kedokteran kardiologi
1.3.2.18.10	Alat-alat kedokteran neurologi
1.3.2.18.11	Alat-alat kedokteran orthopedi
1.3.2.18.12	Alat-alat kedokteran hewan
1.3.2.18.13	Alat-alat farmasi
1.3.2.18.14	Alat-alat penyakit dalam/internis
1.3.2.19	Alat-alat Laboratorium
1.3.2.19.01	Alat-alat laboratorium biologi
1.3.2.19.02	Alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
1.3.2.19.03	Alat-alat laboratorium kimia
1.3.2.19.04	Alat-alat laboratorium pertanian
1.3.2.19.05	Alat-alat laboratorium peternakan
1.3.2.19.06	Alat-alat laboratorium perkebunan
1.3.2.19.07	Alat-alat laboratorium perikanan
1.3.2.19.08	Alat-alat laboratorium bahasa
1.3.2.19.09	Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.3.2.20	Alat-alat Persenjataan/Keamanan
1.3.2.20.01	Senjata api
1.3.2.20.02	Water canon
1.3.2.20.03	Borgol
1.3.2.20.04	Sangkur/bayonet
1.3.2.20.05	Perisai/tameng
1.3.2.20.06	Detektor logam
1.3.2.20.07	Rompi anti peluru
1.3.2.20.08	Pentungan
1.3.2.20.09	Helm
1.3.2.20.10	Alarm/sirene
1.3.2.20.11	Sentolop/senter
1.3.3	Gedung dan Bangunan
1.3.3.01	Gedung Kantor
1.3.3.01.01	Gedung kantor
1.3.3.02	Gedung Rumah Jabatan
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas
1.3.3.03.01	Gedung rumah dinas

KODE	URAIAN
1	2
1.3.3.04	Gedung Gudang
1.3.3.04.01	Gedung gudang
1.3.3.05	Bangunan bersejarah
1.3.3.05.01	Bangunan bersejarah
1.3.3.06	Bangunan monumen
1.3.3.06.01	Bangunan monumen
1.3.3.07	Tugu peringatan
1.3.3.07.01	Tugu peringatan
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.3.4.01	Jalan
1.3.4.01.01	Jalan
1.3.4.01.02	Jalan fly over
1.3.4.01.03	Jalan under pass
1.3.4.02	Jembatan
1.3.4.02.01	Jembatan gantung
1.3.4.02.02	Jembatan ponton
1.3.4.02.03	Jembatan penyebrangan orang
1.3.4.02.04	Jembatan penyebrangan diatas air
1.3.4.03	Jaringan Air
1.3.4.03.01	Jaringan irigasi/waduk/bendungan
1.3.4.03.02	Jaringan air bersih/air minum
1.3.4.03.03	Reservoir
1.3.4.03.04	Pintu air
1.3.4.04	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
1.3.4.04.01	Lampu hias jalan
1.3.4.04.02	Lampu hias taman
1.3.4.04.03	Lampu penerang hutan kota
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon
1.3.4.05.01	Instalasi Listrik
1.3.4.05.02	Jaringan Telepon
1.3.5	Aset Tetap Lainnya
1.3.5.01	Buku dan Kepustakaan
1.3.5.01.01	Buku matematika
1.3.5.01.02	Buku fisika
1.3.5.01.03	Buku kimia
1.3.5.01.04	Buku biologi
1.3.5.01.05	Buku biografi
1.3.5.01.06	Buku geografi
1.3.5.01.07	Buku astronomi
1.3.5.01.08	Buku arkeologi
1.3.5.01.09	Buku bahasa dan sastra
1.3.5.01.10	Buku keagamaan
1.3.5.01.11	Buku sejarah
1.3.5.01.12	Buku seni dan budaya
1.3.5.01.13	Buku ilmu pengetahuan umum
1.3.5.01.14	Buku ilmu pengetahuan sosial
1.3.5.01.15	Buku ilmu politik dan ketatanegaraan
1.3.5.01.16	Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
1.3.5.01.17	Buku ensiklopedia
1.3.5.01.18	Buku kamus bahasa
1.3.5.01.19	Buku ekonomi dan keuangan
1.3.5.01.20	Buku industri dan perdagangan
1.3.5.01.21	Buku peraturan perundang-undangan

KODE	URAIAN
1	2
1.3.5.01.22	Buku naskah
1.3.5.01.23	Terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)
1.3.5.01.24	Mikrofilm
1.3.5.01.25	Peta/atlas/globe
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1.3.5.02.01	Lukisan/foto
1.3.5.02.02	Patung
1.3.5.02.03	Ukiran
1.3.5.02.04	Pahatan
1.3.5.02.05	Batu alam
1.3.5.02.06	Maket/miniatur/diorama
1.3.5.03	Hewan/Ternak dan Tanaman
1.3.5.03.01	Hewan kebun binatang
1.3.5.03.02	Ternak
1.3.5.03.03	Tanaman
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7	Akumulasi Penyusutan
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
1.4	DANA CADANGAN
1.4.1	Dana Cadangan
1.4.1.01	Dana Cadangan
1.4.1.01.01	Dana Cadangan
1.5	ASET LAINNYA
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
1.5.1.01.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
1.5.1.02	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
1.5.1.02.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah
1.5.2.01.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.3.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
1.5.3.01.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
1.5.3.02	Bangun serah guna(Build, Transfer and Operate/BTO)
1.5.3.02.01	Bangun serah gunaBuild, Transfer and Operate/BTO)
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)
1.5.3.03.01	Kerjasama Operasi (KSO)
1.5.4	Aset Tidak Berwujud
1.5.4.01	Aset Tidak Berwujud
1.5.4.01.01	Aset Tidak Berwujud

KODE	URAIAN
1	2
1.5.5	Aset Lain-lain
1.5.5.01	Aset Lain-lain
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain
1.6	RK SKPD
1.6.1	URUSAN WAJIB
1.6.1.01	PENDIDIKAN
1.6.1.01.01	RK DINAS PENDIDIKAN
1.6.1.02	KESEHATAN
1.6.1.02.01	RK Dinas Kesehatan
1.6.1.02.02	RK Rumah Sakit Umum Daerah
1.6.1.03	PEKERJAAN UMUM
1.6.1.03.01	RK Dinas Pekerjaan Umum
1.6.1.04	PERUMAHAN
1.6.1.04.01	RK Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
1.6.1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.6.1.06.01	RK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.6.1.07	PERHUBUNGAN
1.6.1.07.01	RK Dinas Perhubungan dan Infokom
1.6.1.08	LINGKUNGAN HIDUP
1.6.1.08.02	RK Badan Lingkungan Hidup
1.6.1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.6.1.10.01	RK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.6.1.11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.6.1.11.01	RK Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
1.6.1.13	SOSIAL
1.6.1.13.01	RK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1.6.1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.6.1.15.01	RK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah
1.6.1.16	PENANAMAN MODAL
1.6.1.16.01	RK Kantor Penanaman Modal
1.6.1.17	KEBUDAYAAN
1.6.1.17.01	RK Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
1.6.1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.6.1.19.01	RK Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.6.1.19.03	RK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.6.1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH
1.6.1.20.01	RK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.6.1.20.02	RK Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
1.6.1.20.03	RK Sekretariat Daerah
1.6.1.20.04	RK Sekretariat DPRD
1.6.1.20.05	RK Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.6.1.20.06	RK Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.6.1.20.07	RK Inspektorat
1.6.1.20.09	RK Badan Kepegawaian Daerah
1.6.1.20.10	RK Kecamatan Siak
1.6.1.20.11	RK Kecamatan Sungai Apit

KODE	URAIAN
1	2
1.6.1.20.12	RK Kecamatan Minas
1.6.1.20.13	RK Kecamatan Tualang
1.6.1.20.14	RK Kecamatan Dayun
1.6.1.20.15	RK Kecamatan Kerinci Kanan
1.6.1.20.16	RK Kecamatan Bunga Raya
1.6.1.20.17	RK Kecamatan Sungai Mandau
1.6.1.20.18	RK Kecamatan Kandis
1.6.1.20.19	RK Kecamatan Koto Gasib
1.6.1.20.20	RK Kecamatan Lubuk Dalam
1.6.1.20.21	RK Kecamatan Sabak Auh
1.6.1.20.22	RK Kecamatan Mempura
1.6.1.20.23	RK Kecamatan Pusako
1.6.1.20.24	RK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
1.6.1.21	KETAHANAN PANGAN
1.6.1.21.01	RK Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1.6.1.24	KEARSIPAN
1.6.1.24.01	RK Kantor Perpustakaan dan Arsip
1.6.2	URUSAN PILIHAN
1.6.2.01	PERTANIAN
1.6.2.01.01	RK Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
1.6.2.02	KEHUTANAN
1.6.2.02.01	RK Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	KEWAJIBAN
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
2.1.1.01	Utang Taspen
2.1.1.01.01	Utang Taspen
2.1.1.02	Utang Askes
2.1.1.02.01	Utang Askes
2.1.1.03	Utang PPh Pusat
2.1.1.03.01	Utang PPh Pusat
2.1.1.04	Utang PPN Pusat
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat
2.1.1.05	Utang Taperum
2.1.1.05.01	Utang Taperum
2.1.1.06	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2.1.1.06.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2.1.1.06.02	Iuran Wajib Pegawai
2.1.1.06.03	Tabungan Perumahan Pegawai
2.1.1.06.05	Iuran Kesehatan
2.1.1.06.06	Denda
2.1.1.06.07	Iuran Astek
2.1.1.06.08	PPh Pasal 4 Ayat 2
2.1.1.06.09	Setoran Pajak Hotel dan Restoran
2.1.1.06.10	Jaminan Kecelakaan Kerja
2.1.1.06.11	Jaminan Kematian
2.1.2	Utang Bunga
2.1.2.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat
2.1.2.01.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat

KODE	URAIAN
1	2
2.1.2.02	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
2.1.2.02.01	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
2.1.2.03	Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
2.1.2.03.01	Utang Bunga kepada BUMN
2.1.2.03.02	Utang Bunga kepada BUMD
2.1.2.04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank
2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan
2.1.2.05	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2.1.2.05.01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2.1.2.06	Utang Bunga Luar Negeri
2.1.2.06.01	Utang Bunga Luar Negeri
2.1.3	Utang Pajak
2.1.3.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
2.1.3.02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
2.1.3.03	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
2.1.3.03.01	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai
2.1.3.04	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.01	Utang Bank
2.1.4.01.01	Utang Bank
2.1.4.02	Utang Obligasi
2.1.4.02.01	Utang Obligasi
2.1.4.03	Utang Pemerintah Pusat
2.1.4.03.01	Utang Pemerintah Pusat
2.1.4.04	Utang Pemerintah Provinsi
2.1.4.04.01	Utang Pemerintah Provinsi
2.1.4.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2.1.4.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten
2.1.4.05.02	Utang Pemerintah Kota
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.5.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
2.1.5.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
2.1.5.02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2.1.5.02.01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2.1.5.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2.1.5.03.01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.01	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek Lainnya

KODE	URAIAN
1	2
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1	Utang Dalam Negeri
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.2.1.02	Utang Dalam Negeri - Obligasi
2.2.1.02.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi
2.2.1.03	Utang Pemerintah Pusat
2.2.1.03.01	Utang Pemerintah Pusat
2.2.1.04	Utang Pemerintah Provinsi
2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Provinsi
2.2.1.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2.2.2	Utang Luar Negeri
2.2.2.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan
2.2.2.01.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan
3	EKUITAS DANA
3.1	EKUITAS DANA LANCAR
3.1.2	Cadangan Piutang
3.1.2.01	Cadangan Piutang
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang
3.1.3	Cadangan Persediaan
3.1.3.01	Cadangan Persediaan
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan
3.1.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
3.1.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
3.1.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.2.1.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
3.2.2.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
3.2.3.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
3.2.3.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
3.2.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
3.2.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

KODE	URAIAN
1	2
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.3.1.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
3.4	RK PPKD
3.4.1	RK PPKD
3.4.1.01	RK PPKD
3.4.1.01.01	RK PPKD

1/ BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

KODE	URAIAN
1	2
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga
5.2	BELANJA LANGSUNG
5.2.1	Belanja Pegawai
5.2.1.01	Honorarium PNS
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Peneliti Pelaksana Kontrak
5.2.1.01.06	Honorarium Staf PPTK
5.2.1.02	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
5.2.1.03	Uang Lembur
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)
5.2.2.01.04	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09	Belanja bahan habis pakai material kesehatan
5.2.2.01.10	Belanja bahan habis pakai material laboratorium
5.2.2.01.11	Belanja bahan habis pakai material besi
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai radiologi
5.2.2.01.14	Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor
5.2.2.01.15	Belanja bahan kelengkapan pertukangan
5.2.2.01.16	Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
5.2.2.01.17	Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
5.2.2.01.18	Belanja bahan habis pakai radiologi
5.2.2.01.19	Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
5.2.2.01.20	Belanja bahan pengharum ruangan
5.2.2.01.21	Belanja bahan pelumas
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06	Belanja tas kegiatan
5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.08	Belanja Plakat, Souvenir dan Figura
5.2.2.02.09	Belanja dekorasi
5.2.2.02.10	Belanja dokumentasi
5.2.2.02.11	Belanja bahan arsip dokumen
5.2.2.02.12	Belanja kelengkapan olah raga
5.2.2.02.13	Belanja bahan specimen

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.02.14	Belanja bahan inseminasi buatan
5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak
5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi
5.2.2.02.18	Belanja bahan makan ternak
5.2.2.02.19	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
5.2.2.02.20	Belanja bahan pupuk
5.2.2.02.21	Belanja baju pasien
5.2.2.02.22	Belanja bahan pestisida
5.2.2.02.23	Belanja bahan citra satelit/foto udara
5.2.2.02.24	Belanja Cetak Sawah
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja jasa telepon
5.2.2.03.02	Belanja jasa air
5.2.2.03.03	Belanja jasa listrik
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang
5.2.2.03.05	Belanja berlangganan surat kabar / majalah
5.2.2.03.06	Belanja jasa kawat / faksimili / internet
5.2.2.03.07	Belanja jasa paket / pengiriman
5.2.2.03.08	Belanja jasa sertifikasi
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.14	Belanja jasa administrasi peserta
5.2.2.03.15	Belanja jasa perawatan kesehatan
5.2.2.03.16	Belanja jasa administrasi pengolahan arsip SKPKD/KPKD
5.2.2.03.17	Belanja jasa analisis di laboratorium
5.2.2.03.18	Belanja jasa dekorasi
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kematian Non PNS
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service kendaraan bermotor
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan bermotor
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01	Belanja cetak
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan
5.2.2.06.03	Belanja penjilidan
5.2.2.06.04	Belanja layout dan typesetting
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05	Belanja sewa tanah
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator
5.2.2.09.02	Belanja sewa Buldoser
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
5.2.2.10.08	Belanja sewa mesin peralatan kerja
5.2.2.10.09	Belanja sewa GPS
5.2.2.10.10	Belanja sewa Kompas
5.2.2.10.11	Belanja sewa Mesin Bor
5.2.2.10.12	Belanja sewa planimeter
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.2.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.2.2.17.03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.18	Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.18.01	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.2.2.18.02	Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
5.2.2.18.03	Belanja Jasa Publikasi Media Internet
5.2.2.19	Belanja Jasa Kebersihan
5.2.2.19.01	Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga
5.2.2.20	Belanja Jasa Keamanan
5.2.2.20.01	Belanja Jasa Keamanan

KODE	URAIAN
1	2
5.2.2.21	Belanja Pajak
5.2.2.21.01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
5.2.2.22	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.22.01	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.22.02	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.22.03	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.22.04	Belanja Pemeliharaan Sungai, Suak, dan Saluran Air
5.2.2.23	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.23.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.23.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.23.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.24	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.24.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5.2.2.24.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.24.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5.2.2.24.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.24.05	Belanja Beasiswa Izin Belajar Bagi PNS
5.2.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5.2.2.25.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.25.03	Belanja Kepesertaan
5.2.2.26	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.26.01	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan Jasa
5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.30	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli
5.2.2.30.01	Honorarium narasumber/tenaga ahli
5.2.2.30.02	Akomodasi narasumber/tenaga ahli
5.2.2.30.03	Transport narasumber/tenaga ahli
5.2.2.31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.31.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
5.2.2.31.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2.32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)
5.2.2.33	Belanja Beasiswa Pendidikan
5.2.2.33.01	Bantuan Praja IPDN
5.2.2.34	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.34.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.34.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.35	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.35.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.2.2.35.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.2.3	Belanja Modal
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.3.01.12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
5.2.3.01.13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum Jalan
5.2.3.01.32	Belanja modal pengadaan tanah kawasan industri
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01	Belanja modal pengadaan traktor
5.2.3.02.02	Belanja modal pengadaan bulldozer
5.2.3.02.03	Belanja modal pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04	Belanja modal pengadaan eskavator
5.2.3.02.05	Belanja modal pengadaan dump truk
5.2.3.02.06	Belanja modal pengadaan crane
5.2.3.02.07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5.2.3.03.08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.03.14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak
5.2.3.04.02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03	Belanja modal pengadaan becak
5.2.3.04.04	Belanja modal pengadaan sepeda
5.2.3.04.05	Belanja modal pengadaan karavan

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
5.2.3.05.01	Belanja modal pengadaan kapal motor
5.2.3.05.02	Belanja modal pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03	Belanja modal pengadaan speed boat
5.2.3.05.04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05	Belanja modal pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06	Belanja modal pengadaan jet foil
5.2.3.05.07	Belanja modal pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08	Belanja modal pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09	Belanja modal pengadaan kapal kargo
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan perahu sampan
5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04	Belanja modal pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05	Belanja modal pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci
5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05	Belanja modal pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang amfibi
5.2.3.07.07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01	Belanja modal pengadaan mesin las
5.2.3.08.02	Belanja modal pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras
5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan Dinamo
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin packaging
5.2.3.08.08	Belanja modal pengadaan generator
5.2.3.08.09	Belanja modal pengadaan peralatan pertukangan
5.2.3.08.10	Belanja modal pengadaan peralatan kelistrikan
5.2.3.08.11	Belanja modal pengadaan peralatan teknisi elektronika
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04	Belanja modal pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
5.2.3.09.06	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak
5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan peralatan RPH/RPU
5.2.3.09.08	Belanja modal pengadaan alat inseminasi buatan
5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan karamba
5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan jaring, pukot dan sejenisnya
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan kincir
5.2.3.09.12	Belanja modal pengadaan mesin penyuling
5.2.3.09.13	Belanja modal pengadaan mesin penggiling
5.2.3.09.14	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan
5.2.3.09.15	Belanja modal pengadaan mesin pengurai hasil pertanian
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03	Belanja modal pengadaan mesin stensil
5.2.3.10.04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.05	Belanja modal pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06	Belanja modal pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.10.09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan alat pompa
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.10.15	Belanja modal pengadaan genset
5.2.3.10.16	Belanja modal pengadaan peralatan laundry
5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan Trafo
5.2.3.10.18	Belanja modal pengadaan mesin laminating
5.2.3.10.19	Belanja modal pengadaan mesin fogging
5.2.3.10.20	Belanja modal pengadaan spraycan dan hand sprayer (alat penyemprot)
5.2.3.10.21	Belanja modal pengadaan peralatan Packaging
5.2.3.10.22	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
5.2.3.10.23	Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya
5.2.3.10.24	Belanja modal pengadaan alat musik
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.01	Belanja modal pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari
5.2.3.11.03	Belanja modal pengadaan brankas
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan penyekat ruangan
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan kipas angin
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/ server
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk, speaker)
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06	Belanja modal pengadaan kursi makan
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan perabot ruangan (rak buku / rak tv)
5.2.3.13.10	Belanja modal pengadaan filling cabinet dan lemari besi
5.2.3.13.11	Belanja modal pengadaan perabot penghias ruangan (vas bunga dll)
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03	Belanja modal pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas
5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan peralatan makan (piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau)
5.2.3.14.08	Belanja modal pengadaan tungku besi
5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan peralatan masak (dandang / wajan / kual dan sejenisnya)
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan karpet
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan peralatan Audio
5.2.3.16.05	Belanja Modal pengadaan Peralatan Pemancar Radio dan Televisi
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01	Belanja modal pengadaan telepon
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili
5.2.3.17.03	Belanja modal pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05	Belanja modal pengadaan radio VHF
5.2.3.17.06	Belanja modal pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07	Belanja modal pengadaan alat sandi
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01	Belanja modal pengadaan timbangan
5.2.3.18.02	Belanja modal pengadaan teodolite
5.2.3.18.03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.06	Belanja modal pengadaan barometer
5.2.3.18.07	Belanja modal pengadaan seismograph
5.2.3.18.08	Belanja modal pengadaan ultrasonograph
5.2.3.18.09	Belanja modal pengadaan alat Automatic Water Level Recording (AWLR)
5.2.3.18.10	Belanja modal pengadaan alat ARR
5.2.3.18.11	Belanja modal pengadaan alat ukur panjang
5.2.3.18.12	Belanja modal pengadaan bejana ukur
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.19.04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.19.05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.3.19.08	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.19.11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
5.2.3.19.12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
5.2.3.19.14	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran penyakit dalam/internis
5.2.3.19.15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat
5.2.3.19.16	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi
5.2.3.19.17	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi
5.2.3.19.18	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anasthesi
5.2.3.19.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran forensik
5.2.3.19.20	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi
5.2.3.19.21	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi medik
5.2.3.19.22	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran prostodentie
5.2.3.19.23	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthodontie
5.2.3.19.24	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik
5.2.3.19.25	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi anatomi
5.2.3.19.26	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.20.05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.06	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.20.07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.21.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.21.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.22.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.3.22.04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.22.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan timbang
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.23.04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.23.09	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pengaman tebing sungai
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pengaman pantai
5.2.3.23.11	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan penataan kawasan danau
5.2.3.23.12	Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah
5.2.3.23.13	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur dan pengeboran
5.2.3.23.14	Belanja modal pengadaan mesin pompa air
5.2.3.23.15	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya
5.2.3.23.16	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pabrik dan sejenisnya
5.2.3.23.17	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan balai
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03	Belanja modal pengadaan peralatan pembangkit listrik
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan
5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan Jerjak
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01	Belanja modal pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02	Belanja modal pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03	Belanja modal pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04	Belanja modal pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05	Belanja modal pengadaan buku biografi

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.27.06	Belanja modal pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07	Belanja modal pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
5.2.3.27.10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11	Belanja modal pengadaan buku sejarah
5.2.3.27.12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5.2.3.27.14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
5.2.3.27.19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan
5.2.3.27.21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.22	Belanja modal pengadaan buku naskah
5.2.3.27.23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)
5.2.3.27.24	Belanja modal pengadaan mikrofilm
5.2.3.27.25	Belanja modal pengadaan peta / atlas / globe
5.2.3.27.26	Belanja modal pengadaan buku pertanian
5.2.3.27.27	Belanja modal pengadaan buku Bahasa Inggris
5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku Karya Umum
5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku filsafat
5.2.3.27.30	Belanja modal pengadaan buku ilmu sosial
5.2.3.27.31	Belanja modal pengadaan buku ilmu murni
5.2.3.27.32	Belanja modal pengadaan buku terapan
5.2.3.27.33	Belanja modal pengadaan buku kesenian dan olahraga
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan lukisan / foto
5.2.3.28.02	Belanja modal pengadaan patung
5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran
5.2.3.28.04	Belanja modal pengadaan pahatan
5.2.3.28.05	Belanja modal pengadaan batu alam
5.2.3.28.06	Belanja modal pengadaan maket / miniatur / diorama
5.2.3.28.07	Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang
5.2.3.29.02	Belanja modal pengadaan ternak
5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5.2.3.30.01	Belanja modal pengadaan senjata api
5.2.3.30.02	Belanja modal pengadaan radar
5.2.3.30.03	Belanja modal pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04	Belanja modal pengadaan borgol
5.2.3.30.05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet
5.2.3.30.06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng
5.2.3.30.07	Belanja modal pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09	Belanja modal pengadaan pentungan
5.2.3.30.10	Belanja modal pengadaan helm
5.2.3.30.11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene
5.2.3.30.12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang / Papan Petunjuk
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk jalan
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk pariwisata
5.2.3.32	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
5.2.3.32.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
5.2.3.33	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.33.01	Belanja Modal Dana BOS

KODE	URAIAN
1	2
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga
6	PEMBIAYAAN DAERAH
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD
6.1.1.01.01	Pajak Daerah
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah
6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.1.1.02.04	Dana Alokasi Khusus (DAK)
6.1.1.02.05	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi
6.1.1.02.06	Dana Penyesuaian
6.1.1.03	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6.1.1.03.01	Lain-lain Pendapatan yang sah
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04	Belanja Modal
6.1.1.04.05	Belanja Bunga
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07	Belanja Hibah
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga
6.1.1.04.12	Penghematan lainnya
6.1.1.05	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
6.1.1.05.01	Uang jaminan
6.1.1.05.02	Potongan Taspen
6.1.1.05.03	Potongan Beras
6.1.1.05.04	Askes
6.1.1.05.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Lainnya
6.1.1.06	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.01	Kegiatan lanjutan
6.1.1.07	Pelampauan penerimaan pembiayaan
6.1.1.07.01	Pelampauan penerimaan pembiayaan
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6.1.3.01.01	BUMD
6.1.3.01.01	Dst
6.1.3.02	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6.1.3.02.01	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

KODE	URAIAN
1	2
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.4.02.01	Pemerintah daerah
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.4.03.01	Bank
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.05	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
6.1.4.05.01	Obligasi atas nama
6.1.4.05.02	Obligasi nomor
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah
6.1.6.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.1.6.01.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.01.02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.01.03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1.6.02	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.02.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.03	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.6.03.01	Pemerintah daerah
6.1.6.04	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.6.04.01	Bank
6.1.6.05	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.7	Pengembalian Penyertaan Modal
6.1.7.01	Pengembalian penyertaan modal pemda
6.1.7.01.01	Pengembalian penyertaan modal pemda dari BUMD
6.1.7.01.02	Pengembalian penyertaan modal pemda dari Bank
6.1.8	Penerimaan Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.8.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan daerah yang Dipisahkan
6.1.8.01.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.9	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.9.1	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.9.1.1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan nomor
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

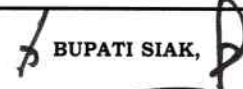
KODE	URAIAN
1	2
6.2.2.01	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6.2.2.01.01	BUMN
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.2.2.02.01	PT Permodalan Siak (PERSI)
6.2.2.02.02	PT Siak Pertambangan Energi (SPE)
6.2.2.02.03	PT Kawasan Industri Buton (KIB)
6.2.2.02.04	PT Bank Riau
6.2.2.02.05	PT. Sarana Pembangunan Siak
6.2.2.03	Badan usaha milik swasta
6.2.2.03.01	Badan
6.2.2.04	Dana Bergulir
6.2.2.04.1	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat
6.2.3	Pembayaran Utang Pemerintah Daerah
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6.2.3.02.01	Pemerintah daerah
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.03.01	Bank
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.04.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.05.01	Penerusan pinjaman
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6.2.3.06.01	Pemerintah daerah
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.07.01	Bank
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.08.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.09	Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6.2.3.09.01	Obligasi atas nama
6.2.3.09.02	Obligasi nomor
6.2.3.10	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6.2.3.10.01	Obligasi atas nama
6.2.3.10.02	Obligasi nomor
6.2.3.11	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6.2.4.01.01	Pemerintah
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain
6.2.4.02.01	Pemerintah daerah
6.2.5	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga
6.2.5.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1		2	
203	XX	15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
203	XX	15.05	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
203	XX	15.06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
203	XX	15.07	Penetapan lokasi tambang rakyat
203	XX	15.08	Inventarisasi dan Penyusunan Data Potensi Pertambangan
203	XX	15.09	Monitoring dan pengendalian penambangan
203	XX	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
203	XX	16.01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
203	XX	16.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
203	XX	16.03	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
203	XX	16.04	Pembuatan Sumur Pantau Air Tanah
203	XX	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
203	XX	17.01	Koordinasi pengembangan ketenaga listrikian
203	XX	17.02	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Mempura
203	XX	17.03	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Koto Gasib
203	XX	17.04	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Kandis
203	XX	17.05	Pembangunan PLTS Bagi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Kandis
203	XX	17.06	Perncaaan Listrik Pedesaan di Pemukiman Balai Kayang dan Mesjid Komplek Kediaman Kepala Daerah di Kecamatan Siak
203	XX	17.07	Perencanaan Listrik Pedesaan di Kabupaten Siak
203	XX	17.08	Pembangunan Listrik Pedesaan di Desa Berbari
203	XX	17.09	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Bagi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Sungai Mandau
203	XX	17.10	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Siak
203	XX	17.11	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Bungaraya
203	XX	17.12	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Dayun
203	XX	17.13	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Pusako
203	XX	17.14	Pembangunan Tower Tegangan Menengah dan Kelengkapannya di Kabupaten Siak
203	XX	17.15	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah
203	XX	17.16	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Minas
203	XX	17.17	Pembangunan Listrik Pedesaan di Desa Merempan Hulu RT.01 sampai RT.02 Menuju Desa Tumang Kecamatan Siak
203	XX	17.18	Pembangunan PLTS Terpusat dan Kelengkapannya di Kecamatan Sungai Mandau
203	XX	17.19	Pembangunan Listrik Pedesaan dan Jaringan PLN Menuju Kec. Minas
203	XX	17.20	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Sungai Mandau
203	XX	17.21	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Sabak Auh
203	XX	17.22	Updating Database dan Sistem Informasi Geografis Sistem Kelistrikan
203	XX	17.23	Penyusunan Kajian Potensi Sumber Energi Alternatif
203	XX	17.24	Pembangunan Pembangkit Biogas di Kabupaten Siak
203	XX	17.25	Pembangunan Listrik Pedesaan di Kecamatan Tualang
203	XX	18	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas
203	XX	18.01	Validasi Data Pendukung Lifting DBH SDA Migas
203	XX	18.02	Inventarisasi badan usaha jasa penunjang migas hulu dan hilir kegiatan minyak dan gas di Kabupaten Siak
203	XX	19	Program Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah
203	XX	19.01	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Air Tanah
203	XX	19.02	Pengadaan kelengkapan sistem informasi geografis
203	XX	19.03	Eksplorasi dan Pemetaan Potensi Air Tanah di Kabupaten Siak
203	XX	19.04	Penyusunan database pertambangan dan energi Kabupaten Siak
203	XX	19.05	Pembuatan sumur bor air tanah
203	XX	19.06	Survey investigasi detail dan perencanaan pembuatan sumur bor dan kelengkapannya
203	XX	20	Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
203	XX	20.01	Monitoring dan Evaluasi PJU Kabupaten Siak
203	XX	20.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan PJU Kabupaten Siak
203	XX	20.03	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kecamatan Siak
203	XX	20.04	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi PJU Kabupaten Siak
203	XX	20.05	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Kabupaten Siak
203	XX	20.06	Pengadaan Armatur di Kabupaten Siak
204			Pariwisata
204	XX	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
204	XX	15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
204	XX	15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
204	XX	15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
204	XX	15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
204	XX	15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
204	XX	15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
204	XX	15.07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan
204	XX	15.08	Pelatihan pemandu wisata terpadu
204	XX	15.09	Pekan Safar `` Tradisi Ghatib Beghanyut `` Ritual Tolak Bala
204	XX	15.10	Perayaan menyambut Hari besar keagamaan
204	XX	15.11	Malay Art Festival
204	XX	15.12	Mengikuti festival dan parade
204	XX	15.13	Penampilan dan festival seni kabupaten siak
204	XX	15.14	Pembuatan/sewa media/space iklan promosi pariwisata
204	XX	15.15	Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah
204	XX	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
204	XX	16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	
1		2	
204	XX	16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
204	XX	16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
204	XX	16.04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
204	XX	16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
204	XX	16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata
204	XX	16.07	Pengembangan; sosialisasi; dan penerapan serta pengawasan standardisasi
204	XX	16.08	Rehab Sedang/berat peninggalan bersejarah
204	XX	16.09	Festival Siak Bermadah
204	XX	16.10	Pembangunan Landscape Taman Burung
204	XX	17	Program Pengembangan Kemitraan
204	XX	17.01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database
204	XX	17.02	Pengembangan dan penguatan litbang; kebudayaan dan pariwisata
204	XX	17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
204	XX	17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
204	XX	17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
204	XX	17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
204	XX	17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
204	XX	17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
204	XX	17.09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan
205			Kelautan dan Perikanan
205	XX	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
205	XX	15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
205	XX	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
205	XX	16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
205	XX	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
205	XX	17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
205	XX	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
205	XX	18.01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
205	XX	19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
205	XX	19.01	Penyuluhan budaya kelautan
205	XX	20	Program pengembangan budidaya perikanan
205	XX	20.01	Pengembangan bibit ikan unggul
205	XX	20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
205	XX	20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
205	XX	20.04	Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan
205	XX	20.05	Pelatihan CPIB, CBIB dan Pelatihan Pembuatan Pelet Ikan
205	XX	20.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
205	XX	20.07	Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB)
205	XX	20.08	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas perikanan budidaya
205	XX	20.09	Pelatihan pengembangan sistem kesehatan dan lingkungan budidaya ikan
205	XX	20.10	Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan
205	XX	21	Program pengembangan perikanan tangkap
205	XX	21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
205	XX	21.02	Pembangunan tempat pelelangan ikan
205	XX	21.03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
205	XX	21.04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
205	XX	21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
205	XX	21.06	Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
205	XX	21.07	Motorisasi Armada Perikanan dalam Upaya Peningkatan Daya Jelajah dan Produksi
205	XX	21.08	Gelar operasional pengawasan terpadu pengairan
205	XX	21.09	Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan tangkap (PUMP-PT)
205	XX	21.10	Pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap
205	XX	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
205	XX	22.01	Kajian sistem penyuluhan perikanan
205	XX	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
205	XX	23.01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
205	XX	23.02	Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP - P2HP)
205	XX	23.03	Lomba Masak Berbahan Serba Ikan dan Sosialisasi Gemar Makan Ikan
205	XX	23.04	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
205	XX	23.05	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan
205	XX	23.06	Pelatihan pengolahan produk hasil perikanan
205	XX	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar
205	XX	24.01	Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar
205	XX	25	Penyebbarluasan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
205	XX	25.01	Penyusunan Data dan Informasi Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan
205	XX	25.02	Pengelolaan dan Pemutakhiran data perikanan dan kelautan
206			Perdagangan

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
206	XX	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
206	XX	15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
206	XX	15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
206	XX	15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
206	XX	15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah (Pendataan potensi dan pengguna UTTP di pasar dan Masyarakat)
206	XX	15.05	Pelayanan Tera dan Tera Ulang Kemeterologian Daerah
206	XX	15.06	Pengawasan UTTP (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit dan Masyarakat)
206	XX	15.07	Sosialisasi Perlindungan Konsumen
206	XX	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
206	XX	16.01	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
206	XX	16.02	Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
206	XX	16.03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
206	XX	16.04	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
206	XX	16.05	koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
206	XX	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
206	XX	17.01	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
206	XX	17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
206	XX	17.03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
206	XX	17.04	Pengembangan data base informasi potensi unggulan
206	XX	17.05	Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional; bilateral; regional dan Internasional
206	XX	17.06	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
206	XX	17.07	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
206	XX	17.08	Membangun jejaring dengan eksportir
206	XX	17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha
206	XX	17.10	Pengembangan kluster produk ekspor
206	XX	17.11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
206	XX	17.12	Pembangunan promosi perdagangan internasional
206	XX	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
206	XX	18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan; kebijakan dan pelaksanaan operasional
206	XX	18.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
206	XX	18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
206	XX	18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
206	XX	18.05	Pengembangan pasar lelang daerah
206	XX	18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
206	XX	18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
206	XX	18.08	Monitoring Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Siak dan Operasional Pasar
206	XX	18.09	Pengawasan Pendistribusian Paket Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi
206	XX	19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
206	XX	19.01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
206	XX	19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.
206	XX	19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.
206	XX	19.04	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan.
206	XX	19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.
206	XX	19.06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan.
206	XX	20	Program Pengembangan Kinerja Pasar
206	XX	20.01	Peningkatan/Pemeliharaan Pasar
206	XX	20.02	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pembangunan sarana dan prasarana pasar Kec. Sei. Apit)
206	XX	20.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kec. Kandis)
206	XX	20.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pasar
206	XX	20.05	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Mempura)
206	XX	20.06	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Bunga Raya)
206	XX	20.07	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Tualang)
206	XX	20.08	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan Sabak Auh)
206	XX	20.09	Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
207			Industri
207	XX	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
207	XX	15.01	Koordinasi modal ventura bagi Industri berbasis teknologi
207	XX	15.02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
207	XX	15.03	Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi
207	XX	15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi; pengujian dan kualitas
207	XX	15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
207	XX	15.06	Penguatan kemampuan Industri berbasis teknologi
207	XX	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
207	XX	16.01	Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
207	XX	16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
207	XX	16.03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
207	XX	16.04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
207	XX	16.05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
207	XX	16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan menengah dengan swasta
207	XX	16.07	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir
207	XX	16.08	Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Industri Berprestasi

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
207	XX	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
207	XX	17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri
207	XX	17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
207	XX	17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
207	XX	17.04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
207	XX	17.05	Pelatihan Teknis Tenun Siak
207	XX	17.06	Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan
207	XX	17.07	Pelatihan Diversifikasi produk Kerajinan Batik Siak
207	XX	17.08	Pelatihan Diversifikasi Produk Kerajinan Keramik
207	XX	18	Program Penataan Struktur Industri
207	XX	18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
207	XX	18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
207	XX	18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
207	XX	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
207	XX	19.01	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
207	XX	19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
208			Ketransmigrasian
208	XX	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
208	XX	15.01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
208	XX	15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah; antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
208	XX	15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
208	XX	15.04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
208	XX	15.05	Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
208	XX	15.06	Pembinaan dan pengembangan daerah transmigrasi
208	XX	15.07	Pendataan Eks Transmigrasi
208	XX	16	Program Transmigrasi lokal
208	XX	16.01	Penyuluhan transmigrasi lokal
208	XX	16.02	Pelatihan transmigrasi lokal
208	XX	17	Program Transmigrasi regional
208	XX	17.01	Penyuluhan transmigrasi regional
208	XX	17.02	Pelatihan transmigrasi regional


 BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR

**DAFTAR KODE AKUN APBD
 KABUPATEN SIAK APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	URAIAN
1	2
4	PENDAPATAN DAERAH
4.1	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1	Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01	Pajak Hotel
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10	Motel
4.1.1.01.11	Cottage
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata
4.1.1.02	Pajak Restoran
4.1.1.02.01	Restoran
4.1.1.02.02	Rumah Makan
4.1.1.02.03	Kafetaria
4.1.1.02.04	Kantin
4.1.1.02.05	Katering
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.07	Bar
4.1.1.02.08	Jasa Boga
4.1.1.03	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05	Pameran
4.1.1.03.06	Diskotik
4.1.1.03.07	Karaoke
4.1.1.03.08	Klub Malam
4.1.1.03.09	Sirkus/akrobat/sulap
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar
4.1.1.03.11	Permainan Golf
4.1.1.03.12	Permainan Bowling
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14	Balap Kendaran Bermotor
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17	Mandi Uap/spa
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga
4.1.1.04	Pajak Reklame
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron
4.1.1.04.02	Reklame Kain
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker